

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan refleksi atau cerminan ideologi yang dianut oleh suatu negara. Cerminan ini terlihat dari ide ataupun nilai yang termuat pada keluaran produk hukum yang harus bercorakkan ideologi yang dianut negara tersebut. Dalam posisi idealnya, di Indonesia seharusnya Pancasila sebagai ideologi mempengaruhi muatan peraturan perundang-undangan yang ada dan sekaligus memberikan ruang berlakunya norma-norma yang hidup dalam masyarakat lokal selama tidak bertentangan dengan Pancasila. Bila diperhatikan dari perspektif ajaran *Stufenbau des Recht* yang merupakan teori Adolf Merkl yang dikembangkan dari lebih lanjut dalam teori hukum murni Hans Kelsen, posisi Pancasila sama sekali tidak dapat disebutkan sebagai ideologi dikarenakan hukum dalam pandangan ini “dibersihkan dari anasir-anasir yang tidak yuridis seperti etis, sosiologis, politis dan sebagainya” dan “sama sekali terlepas dari *das sein/* kenyataan sosial”.¹ Dalam pandangan ini Pancasila disebutkan sebagai *grundnorm*.

Memperhatikan kontradiksi di atas, Pancasila dari kedua terminologi tersebut (baik dilihat sebagai ideologi, maupun *grundnorm*) dilihat dan diposisikan dengan cara yang berbeda. Pancasila dikatakan sebagai

¹ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2004, hlm. 61.

ideologi negara ketika memberikan pengaruh kepada setiap sendi dan sektor kehidupan bangsa (termaksud sektor kehidupan hukum), sedangkan diposisikan sebagai sebagai *grundnorm* atau norma dasar yang sangat abstrak ketika menjadi sumber utama untuk mengkonkritkan setiap peraturan perundang-undangan dari puncak hierarkisnya sampai ke tingkatan terendah. Berdasarkan penjelasan ini, maka Pancasila sebagai *grundnorm* merupakan bagian kecil dari posisi Pancasila sebagai ideologi negara. Begitulah posisi penting sebuah ideologi bagi sebuah negara yang peneliti analogikan dengan mempergunakan contoh Pancasila.

Kedudukan Pancasila sebagai ideologi Negara dapat diacukan pada petikan bunyi alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Secara eksplisit memang tidak disebutkan istilah Pancasila sebagai ideologi pada alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945, namun secara substansial kandungan Pancasila yang disebutkan tersebut jelas Pancasila berposisi sebagai ideologi negara. Adapun petikannya, yaitu:

”....., maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa; kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Selanjutnya, patut diketahui bahwa terminologi “Pancasila sebagai ideologi negara” bukanlah suatu terminologi yuridis yang disebutkan secara eksplisit pada peraturan perundang-undangan. Penyebutan

“Pancasila sebagai ideologi negara” lazim dipergunakan pada literatur, perdiskusian ilmiah atau obrolan masyarakat awam. Terminologi “Pancasila sebagai ideologi negara” sering disinonimkan dengan terminologi “Pancasila sebagai dasar negara”. Pernyataan yang menyatakan bahwa “Pancasila sebagai dasar negara” secara eksplisit dapat diketemukan dalam peraturan perundang-undangan² yang antara lain dimuat pada Ketetapan MPR yang diantaranya sebagai berikut:

1. Pasal 1 Ketetapan MPR–RI Nomor XVIII/ MPR/ 1998 Tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 Tentang Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) Dan Penetapan Tentang Penegasan **Pancasila Sebagai Dasar Negara**, menyebutkan bahwa “Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara”.
2. Ketetapan MPR Nomor III/ MPR/ 2000 Tentang **Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan**, diantaranya menyebutkan: Sumber Hukum dasar nasional yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

Memperhatikan penjelasan di atas, tidaklah keliru bila peneliti tetap berpegang teguh pada penggunaan Pancasila sebagai ideologi negara. Penggunaan peristilahan ideologi ini dirujuk pada pemaknaan ideologi secara melioratif yang mencakup pemaknaan yang luas. Dalam hal ini,

² Lihat Pasal ayat (3) Ketetapan MPR Nomor III/MPRS/2000 Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan yang memasukkan Ketetapan MPR ke dalam tata hierarki peraturan perundang-undangan nasional. Hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang tidak memasukkan Ketetapan MPR ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan

ideologi diartikan “setiap sistem gagasan yang mempelajari keyakinan-keyakinan dan hal-hal yang filosofis, ekonomis, politis dan sosial”.³ Pemaknaan ideologi secara melioratif ini, tentunya dapat menggambarkan posisi Pancasila sebagai ideologi Negara yang tidak dilihat secara sempit, melainkan sebagai filsafat yang memayungi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Singkat kata, Pancasila adalah dasar statis yang mempersatukan sekaligus bintang penuntun (*Leitstar*) yang dinamis, yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya.⁴

Soekarno dalam salah satu tulsannya pernah menyebutkan Pancasila sebagai *Weltanschauung* yang apabila diartikan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia berarti ideologi. Secara lengkap Soekarno sebagaimana dikutip oleh Yudi Latif menyampaikan urgensi Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah sebagai berikut:

Tetapi kecuali Pancasila adalah satu *Weltanschauung*, satu dasar falsafah, Pancasila adalah satu alat mempersatu, yang saya yakin semakin-yakinnya Bangsa Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke hanyalah dapat bersatu padu di atas dasar Pancasila itu. Dan bukan saja alat mempersatu untuk di atasnya kita letakkan Negara Republik Indonesia, tetapi juga pada hakekatnya satu alat mempersatu dalam perjuangan kita melenyapkan segala penyakit yang telah kita lawan berpulu-puluh tahun yaitu penyakit terutama sekali, Imperialisme. Perjuangan suatu bangsa, perjuangan melawan Imperialisme, perjuangan mencapai kemerdekaan, perjuangan sesuatu bangsa yang membawa corak sendiri-sendiri. Tidak ada dua bangsa yang cara berjoangnya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara berjuang sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena pada hakekatnya bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian sendiri. Kepribadian yang terwujud dalam pelbagai hal, dalam kebudayaan, dalam perekonomiannya, dalam wataknya dan lain-lain sebagainya.⁵

³ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 306.

⁴ Yudi Latif, *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2011, hlm.41.

⁵ *Loc. cit*

Memperhatikan kandungan ide Pancasila semakin memperjelas posisi pentingnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, wajar kiranya Pancasila menjadi sesuatu yang dianggap sakral. Kesakralan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilihat ketika terjadinya pergolakan saat dimulainya reformasi di Indonesia. Gaung reformasi yang begitu besar telah melahirkan desakan agar terjadi amandemen UUD 1945 dan desakan perubahan-perubahan lainnya di berbagai sektor kehidupan yang dimaktubkan menjadi program reformasi, namun Pancasila tetap berdiri tegak dan tidak mengalami “gangguan” reformasi. Berkaitan dengan pernyataan tersebut, maka dapat dilihat pendapat Moh. Mahfud MD yang menjelaskan ketidak goyahan posisi Pancasila pada saat reformasi terjadi, yaitu:

Satu hal yang menarik adalah kenyataan bahwa tidak ada yang mempersoalkan Pancasila atau mengusulkan untuk dijadikan bagian dari reformasi. Tidak ada yang ingin agar Pancasila diganti. Semua bersepakat bahwa Pancasila masih harus dijadikan dasar dan ideologi negara. Tidak satu pun dari gagasan-gagasan reformasi politik, hukum, ekonomi, dan lain-lain yang mengusulkan reformasi Pancasila, malahan hampir semuanya mengusulkan agar reformasi itu diorientasikan pada upaya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan.⁶

Selanjutnya, Moh. Mahfud MD menyebutkan minimal ada dua alasan pokok untuk menempatkan Pancasila pada posisi yang tidak dapat diganggu gugat dalam kedudukannya sebagai ideologi dan dasar negara. Pertama, Pancasila sangat cocok dijaikan *platform* kehidupan bersama bagi kehidupan bersama bagi bangsa Indonesia yang sangat majemuk

⁶ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 50.

agar tetap terikat erat sebagai bangsa yang bersatu. Kedua, Pancasila termuat di dalam Pembukaan UUD 1945, yang di dalamnya dan pernyataan kemerdekaan oleh bangsa Indonesia sehingga jika Pancasila diubah, berarti Pembukaan UUD pun diubah.⁷

Sebagai bintang penuntun yang berperan menentukan dan mempengaruhi laju dan gerak kehidupan bangsa, maka wajar kiranya Pancasila sebagai ideologi negara diberikan suatu proteksi khusus. Proteksi tersebut tentunya dilakukan dengan cara memanggil hukum pidana memberikan perlindungan dengan memberikan sanksi bagi siapapun yang mencoba merusak tatanan dasar negara tersebut. Perlindungan sebagaimana tersebut ini diberikan kepada Pancasila dalam posisinya sebagai ideologi negara. Hanya saja proteksi khusus ini, tidaklah boleh semata-mata mengandalkan hukum pidana atau sarana penal dikarenakan akan menimbulkan kepincangan. Hal ini dikarenakan permasalahan ideologi merupakan permasalahan keyakinan yang sudah terpatron dan terkontruksi dipikiran manusia. Oleh karena itu, penggunaan sarana penal yang menekankan pada sanksi harus disokong dengan penggunaan sarana non penal yang memiliki tujuan pencegahan tindak pidana tanpa melalui pendekatan sanksi. Oleh karena itulah, penanggulangan kejahatan yang memiliki ciri khusus seperti kejahatan terhadap ideologi negara (Pancasila) harus dilakukan dengan mempergunakan kebijakan kriminal yang dalam menanggulangi kejahatan

⁷ *Ibid.*, hlm. 51.

tidak sekedar mengedepankan pendekatan sanksi, melainkan juga melalui pendekatan non-penal yang bertitik fokus pada tindakan preventif.

Selanjutnya, ancaman kejahatan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara tidaklah lagi dilakukan melalui cara-cara yang konvensional. Hal ini tidak terlepas dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana ancaman tersebut saat ini telah memanfaatkan komputer melalui teknologi internet. Memang tidak dapat dibantahkan bahwa penggunaan teknologi internet banyak memberikan bantuan untuk menyelesaikan persoalan yang rumit secara efektif dan efisien. Hanya saja, kecanggihan teknologi ini juga berpotensi membuat orang cenderung melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku. Penggunaan teknologi internet telah membentuk masyarakat dunia baru yang tidak lagi dihalangi oleh batas-batas teritorial suatu negara yang dahulu ditetapkan sangat esensial sekali yaitu dunia maya, dunia yang tanpa batas atau realitas virtual (*virtual reality*). Inilah sebenarnya yang dimaksud dengan *Borderless World*.⁸ Dapat dikatakan bahwa pengabaian terhadap kemajuan teknologi dapat berekses lahirnya ancaman-ancaman kejahatan terhadap Pancasila melalui modus yang relatif baru.

Berkaitan dengan kebijakan penanggulangan kejahatan terhadap Pancasila melalui sarana penal selepas dicabutnya Undang-Undang Nomor 11/PNPS/Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi

⁸ Agus Raharjo, *Cybercrime, Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bahkti, Bandung, 2002, hlm. 5.

melalui Undang-Undang Nomor 26 tahun 1999, diatur melalui Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Adapun undang-undang ini menambahkan 6 (enam) Pasal baru dalam KUHP yaitu Pasal 107a, 107b, 107c, 107d, 107e dan 107f, dimana secara garis besar diatur dua macam ketentuan berkaitan dengan kejahatan terhadap ideologi negara, yaitu larangan terhadap ajaran komunisme/ Marxisme-Leninisme dan tindak pidana menyatakan keinginan meniadakan atau mengganti dasar negara Pancasila. Satu Pasal lainnya yang ditambahkan pada KUHP berdasarkan Pasal 1 Undang Nomor 27 tahun 1999 tidaklah termasuk pada kategori kejahatan terhadap ideologi Negara, yaitu Pasal 107f yang mengatur mengenai kejahatan terhadap instalasi militer dan distribusi bahan pokok.

Selain mengandalkan ketentuan yang termuat pada KUHP, patut juga ditelusuri ketentuan di luar KUHP yang dapat dipergunakan untuk menanggulangi penyebaran informasi yang mempertentangkan eksistensi Pancasila. Khusus pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga harus diperhatikan kemampuan peraturan ini untuk menanggulangi kejahatan siber yang dimaksud. Secara keseluruhan, haruslah dijawab pertanyaan mampukah keseluruhan peraturan perundang-undangan yang ada pada saat ini dioperasikan untuk menanggulangi kejahatan terhadap Pancasila yang menggunakan teknologi internet.

Adapun penggunaan upaya non penal dalam menanggulangi kejahatan terhadap Pancasila yang menggunakan teknologi internet tentunya juga harus memperhatikan kondisi dan keadaan yang terkait dengan tindak pidana tersebut. Penggunaan cara-cara konvensional tentu diragukan keefektifannya untuk menanggulangi kejahatan ini. Oleh karena itu, haruslah dilakukan modifikasi terkait dengan penggunaan sarana non penal.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan tesis dengan judul, **“KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN MAYANTARA TERHADAP PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kebijakan penanggulangan kejahatan mayantara terhadap Pancasila sebagai ideologi negara pada saat ini?
2. Bagaimanakah kebijakan penanggulangan kejahatan mayantara terhadap Pancasila sebagai ideologi negara pada masa yang akan datang?

Menghindari penelitian yang rancu dan meluas, maka perumusan masalah yang mencakup penggunaan pendekatan kebijakan penal dan non penal dalam penelitian ini dibatasi cakupannya. Pembatasan pada

penggunaan sarana penal (kebijakan hukum pidana) mencakup pada kebijakan formulasi dan penegakan hukum secara *in abstracto*. Berkaitan dengan penggunaan pendekatan non penal mencakup pencegahan kejahatan mayantara yang ditujukan untuk menyerang ideologi Negara melalui pencegahan langsung pada titik persoalan yang menyebabkan kejahatan terjadi dengan memperhatikan berbagai aspek di luar hukum pidana.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan dan menganalisis kebijakan penanggulangan kejahatan mayantara terhadap Pancasila sebagai ideologi negara pada saat ini;
2. Memberikan gambaran kebijakan penanggulangan kejahatan mayantara terhadap Pancasila sebagai ideologi negara pada masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Secara garis besar penelitian ini diharapkan memperoleh 2 manfaat besar, sebagaimana disebutkan di bawah ini.

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pada spesifikasi cabang ilmu hukum pidana. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini sekaligus dapat dijadikan sebagai tambahan data sekunder yang berkaitan dengan kebijakan penanggulangan kejahatan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara yang dilakukan di dunia virtual.

2. Secara praktis

- a. Bagi pembuat undang-undang, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dan pertimbangan dalam melakukan kebijakan legislatif, sehingga lahir kebijakan hukum pidana yang tepat sasaran dalam pelaksanaan upaya perlindungan terhadap Pancasila di ruang virtual.
- b. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan kejahatan yang tidak menggunakan sarana hukum pidana, agar kebijakan ini berlangsung lebih efektif dalam mencegah terjadinya kejahatan terhadap Pancasila melalui pemanfaatan teknologi internet.
- c. Bagi peneliti, sebagai sarana dalam proses pembelajaran sehingga bermanfaat untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan peneliti di bidang hukum, khususnya hukum pidana

yang seterusnya diharapkan dapat menunjang pekerjaan yang peneliti geluti nantinya.

- d. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan memberikan informasi mengenai perbedaan antara penyalahgunaan penyebaran informasi di dunia maya untuk penyebarluasan ide atau gerakan yang bertujuan menegasikan Pancasila dan penyebaran informasi yang sekedar dimanfaatkan guna keperluan akademis, sehingga masyarakat dapat aktif mengontrol perbuatan-perbuatan mana yang dapat dikategorikan tindak pidana. Kesadaran yang dimiliki masyarakat ini dapat menjadi sarana kontrol terhadap kinerja sub sistem peradilan pidana sehingga meminimalisir kemungkinan penguasa meyalahgunakan kewenangan yang dimiliki sub sistem peradilan pidana.

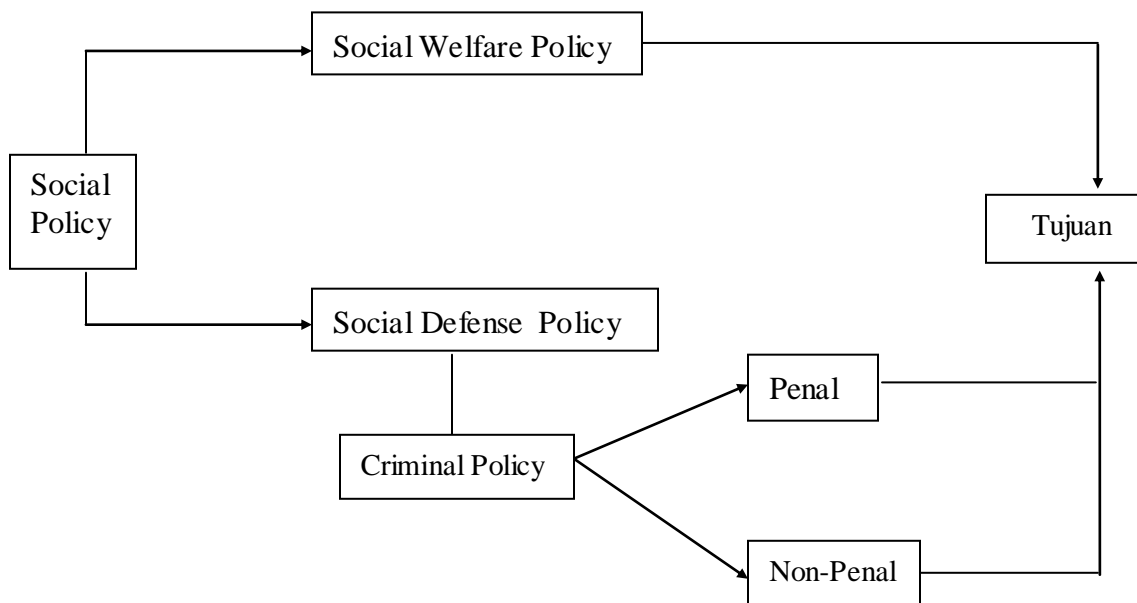
E. Kerangka Pemikiran

1. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan

Pada pembukaan UUD NRI 1945 disebutkan bahwa tujuan dari Negara Indonesia ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan yang dimaksud tersebut secara jelas menggambarkan politik sosial ("yaitu kebijakan atau

upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial”⁹⁾ yang dianut oleh Indonesia. Dalam politik sosial termasuk di dalamnya kebijakan kriminal atau yang dikenal juga dengan peristilahan kebijakan penanggulangan kejahatan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan terintegrasi menjadi bagian dari politik sosial. Secara skematis hubungan anantara keduanya dapat digambarkan sebagai berikut:¹⁰



Berdasarkan skema di atas, dapat diketahui bahwa kebijakan kriminal merupakan kebijakan yang terintegrasi dengan kebijakan sosial, dimana kedudukan kebijakan kriminal merupakan bagian dari kebijakan sosial yang ditujukan untuk melindungi masyarakat.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra, Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 2 dan 3.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 3.

Sebagai sarana perlindungan masyarakat, kebijakan kriminal menggunakan dua pendekatan, yaitu penal dan non penal. Dalam hal ini pendekatan penal maupun dan non penal dioperasikan sejalan satu sama lain untuk menangkal dan menanggulangi kejahatan.

Selanjutnya, istilah kebijakan kriminal yang juga dapat disebutkan sebagai politik kriminal. Berdasarkan pendapat G.P. Hoefnagels sebagaimana disebutkan oleh Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/ mass media*).¹¹

Secara garis besar, pendapat Hoefnagels menjelaskan bahwa terdapat dua jalur penanggulangan kejahatan melalui jalur penal dan non penal. Poin (a) sebagai jalur penal mempergunakan hukum pidana dengan model represif dan poin (b) dan (c) menggunakan jalur non penal dengan upaya diluar hukum pidana yang bertitik berat pada sifat preventif.

Maksud dari kejahatan di sini merupakan representasi dari tindak pidana secara umum. Tindak pidana yang dimaksud merupakan persinoniman dari delik. Dimana pengertian delik dalam artian *strafbaarfeit* menurut para ahli ialah sebagai berikut:

¹¹ *Ibid.*, hlm. 42.

1. Vos: delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan undang-undang.
2. Van Hammel: delik adalah suatu serangan ancaman terhadap hak-hak orang lain.
3. Simons: delik adalah suatu tindakan melanggar hukum telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat di hukum.¹²

Pentingnya hal ini disampaikan agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam memahami apa yang dimaksudkan kejahatan dan tindak pidana yang dipergunakan secara bergantian dengan istilah lain dengan maksud yang sama pada penelitian ini.

Kualifikasi tindak pidana dalam hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan dikenal dengan nama delik hukum (*rechtsdelicten*), sedangkan pelanggaran dikenal dengan delik undang-undang (*wetsdelicten*). Satochid Kartanegara membedakan kedua istilah tersebut berdasarkan hal sebagai berikut:

Rechtsdelicten adalah perbuatan yang dianggap sebagai bertentangan dengan perikeadilan. Sungguhpun, andaikata perbuatan itu tidak dilarang dengan undang-undang dan diancam dengan hukuman, perbuatan itu oleh umum tetap akan dirasakan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan perikeadilan dan patut dilarang. Perbuatan yang demikian itu adalah misalnya membunuh, menipu dsb.

Wetsdelicten adalah justru dilarang dengan undang-undang dan diancam dengan hukuman. Perbuatan-perbuatan ini jika tidak dilarang dengan tegas dengan undang-undang, tidak akan dirasa oleh umum sebagai perbuatan yang salah dan yang patut

¹² Leden Marpaung Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 8.

dilarang. Perbuatan ini misalnya pelanggaran lalu lintas (*verkeersovertreding*).¹³

Memperhatikan penjelasan di atas, dapat diketahui perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan dianggap sebagai tindak pidana yang melanggar dan membahayakan secara *konkret*, sedangkan pelanggaran hanya membahayakan secara *in abstracto* saja.¹⁴ Hal ini dapat diketahui dari landasan historis yang memperlihatkan kejahatan merupakan perbuatan yang sedari dahulu dilarang dan pelanggaran hanya menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Perbedaan lain antara kejahatan dan pelanggaran, juga terlihat dari pengaturan sistematika KUHP, dimana kejahatan diatur pada buku ke II KUHP dan pelanggaran diatur pada buku ke III KUHP. Selain itu, perbedaan lainnya terdapat pada jenis pidana dimana pelanggaran tidak pernah diancam pidana penjara.

Adapun kebijakan penanggulangan kejahatan dalam penelitian ini ditujukan secara spesifik pada kejahatan terhadap Pancasila melalui pemanfaatan teknologi internet. Kejahatan terhadap Pancasila melalui teknologi internet mencakup dua dimensi jenis kejahatan, yaitu sebagai kejahatan politik dan kejahatan mayantara (*cyber crime*). Dengan kata lain, dapat dikatakan kejahatan terhadap Pancasila melalui teknologi internet merupakan salah satu jenis kejahatan mayantara yang menyerang keamanan negara (Ideologi) atau dapat

¹³ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah dan Pendapat2 Para Ahli Hukum Terkemuka Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 46.

¹⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm 99.

juga digolongkan sebaliknya. Kejahatan mayantara yang terangkum dalam delik ini mencakup pada penyebaran informasi dan pembobolan sistem keamanan komputer.

2. Kejahatan Terhadap Pancasila sebagai Kejahatan Politik

Terdapat beberapa alasan kejahatan terhadap Pancasila diposisikan sebagai kejahatan politik. Salah satu alasan tersebut dikarenakan ideologi memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan politik. Dari ideologi yang dianut suatu negara dapat diprediksi kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri negara tersebut. Muatan-muatan cita dan garis besar kebijakan lainnya yang hendak dituju suatu bangsa juga tercermin dari ideologi yang dipegang teguh.

Sebelum peneliti memaparkan hal-hal lebih lanjut yang menjelaskan bahwa kejahatan terhadap Pancasila merupakan kejahatan politik, maka terlebih dahulu akan diuraikan keterkaitan antara ideologi dan politik yang dilihat dari pengertian ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani, dari kata *idea* yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita dan *logos* berarti ilmu. Secara harfiah, maka ideologi dapat diartikan ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Peristilahan ideologi pertama kali dicetuskan oleh Antoine Destutt de Tracy pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan "*sains tentang ide*". Dalam hal ini Tracy sebagaimana disebutkan oleh wikipedia menyebutkan ideologi adalah sistem pemikiran abstrak (tidak hanya sekadar pembentukan ide)

yang diterapkan pada masalah publik sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik.¹⁵

Berdasarkan gambaran di atas, jelas kiranya perbuatan yang mengancam Pancasila sebagai ideologi negara merupakan jenis kejahatan politik. Hal ini disandarkan pada relasi yang erat antara ideologi dan politik. Selajutnya, untuk melihat lebih jelas bahwa kejahatan terhadap ideologi negara (Pancasila) masuk ke dalam jenis kejahatan politik dapat dilihat dari defenisi yang dimaksud dengan kejahatan politik. Pada saat ini belum ditemukan kesamaan pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan kejahatan politik. Tidak adanya kesamaan pendapat tersebut dirasakan sangatlah wajar dikarenakan banyaknya arti dan muatan yang terkandung pada kejahatan politik yang disebutkan oleh para ahli yang ruang lingkup antara lain:

1. Kejahatan terhadap negara/ keamanan negara;
2. Kejahatan terhadap sistem politik;
3. Kejahatan terhadap sistem kekuasaan;
4. Kejahatan terhadap nilai-nilai dasar atau hak-hak dasar dalam bermasyarakat/ bernegara/ berpolitik;
5. Kejahatan yang mengandung unsur/ motif politik;
6. Kejahatan dalam meraih/ mempertahankan/ menjatuhkan kekuasaan
7. Kejahatan terhadap lembaga-lembaga politik;
8. Kejahatan oleh negara/ penguasa/ politisi;
9. Kejahatan penyalahgunaan kekuasaan.¹⁶

Berdasarkan pendapat di atas, terlihat bahwa kejahatan terhadap ideologi negara (Pancasila) dapat memasuki beberapa

¹⁵ www.wikipedia.org/ideologi, diakses tanggal 10 Juni 2011.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2001, hal. 185.

ruang lingkup muatan-muatan kejahatan yang termasuk kejahatan politik, seperti kejahatan terhadap sistem politik, nilai-nilai dasar bernegara atau kejahatan yang bertujuan menjatuhkan kekuasaan. Pengelompokan tersebut dapat lebih jelas apabila tujuan dari kejahatan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara diketahui dengan jelas. Hanya saja berdasarkan pengertian dan cakupan kejahatan politik di atas, maka secara garis besar kejahatan politik dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu: ¹⁷

- a. Kejahatan oleh pemegang kekuasaan; dan
- b. Kejahatan terhadap sistem kekuasaan.

Berkaitan dengan kejahatan politik, Dionysious Spineliss lebih menitik beratkannya kepada kejahatan oleh pemegang kekuasaan. Dalam hal ini, Dionysious Spineliss sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief menyebutkan kejahatan politik sebagai *crimes politician in office* memiliki karakteristik adalah:

- a. mengandung unsur penyalahgunaan jabatan publik (***the abuse of politician office***);
- b. Mengandung unsur pelanggaran kepercayaan (***violation of trust***) atau penyalahgunaan kepercayaan (***abuse of confidence***);
- c. berkaitan dengan dengan kepentingan hukum masyarakat yang sangat serius;
- d. biasanya dilakukan dengan bantuan karyawan sipil atau karyawan partai sebagai kaki tangan, atau sebagai pelaku utama (sementara si politikus sebagai penganjur atau pelaku tidak langsung);
- e. sulitnya tindak pidana ini dideteksi atau dibuktikan;

¹⁷ *Loc. cit.*

- f. munculnya fenomena kembar berupa “penalisasi politik” (*penalization of politics*) dan “politisasi proses peradilan pidana” (*the politicizing of criminal proceedings*).¹⁸

Karakteristik kejahatan politik yang disebutkan oleh Dyonisious Spineliss dirasakan belum memberikan batasan mengenai yang dimaksud dengan kejahatan politik secara sederhana, dikarenakan masih didasarkan pada pengkotomian dua kategori kejahatan politik. Adanya batasan suatu perbuatan dianggap sebagai kejahatan politik memberikan bantuan untuk membedakannya dengan kejahatan biasa. Dalam hal ini, peneliti membatasi perbuatan mana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan politik pada teori “predominan” yang disampaikan oleh Hazewinkel-Soeringa. Teori “predominan” sebagaimana dikutip oleh Loebby Loqman dari Soeringa ialah “diperhatikan apa yang “dominan” dari suatu perbuatan. Apabila yang dominan adalah kejahatan umum, maka perbuatan tersebut tidak disebutkan sebagai delik politik.”¹⁹

Selanjutnya, hal yang juga masih berkaitan dengan kejahatan politik berhubungan dengan unsur subjektif dari penjahat politik. Dalam hal ini harus diperhatikan motif perbuatan dari penjahat politik yang membedakannya dengan penjahat lainnya. Remmelink sebagaimana dikutip oleh Loebby Loqman mengatakan bahwa “seorang penjahat politik dikendalikan oleh motif *altruistis* yang digerakkan oleh hati nuraninya. Penjahat politik ingin merubah

¹⁸ *Ibid*, 178-179.

¹⁹ Loebby Loqman, *Delik Politik di Indonesia*, Penerbit Ind-Hill-Co, Jakarta, 1993, hlm. 46.

masyarakat atau pemimpin dari masyarakat tersebut sesuai dengan idealnya, sedangkan penjahat biasa didorong oleh motif yang bersifat egoitis.”²⁰

Sebagai contoh, perbedaan motif dari penjahat politik dengan penjahat biasa dapat dilihat pada kejadian pemberontakan (perjuangan revolusi) Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965. Dimana pada saat itu, PKI yang dimotori oleh tokoh-tokohnya seperti D.N. Aidit, M.H. Lukman, Njoto dan Sakirman memiliki motif melakukan “revolusi merah” yang bertujuan merebut kekuasaan tertinggi Negara dan mentransformasikan Pancasila dengan ideologi Komunisme. Dalam hal ini, cita-cita kaum komunis pada hendak merebut kekuasaan dengan motif menghilangkan perbedaan kelas. Hal ini hanya sekilas contoh yang menggambarkan motif penjahat politik.

Hal lain yang berkaitan terminologi kejahatan politik ialah dimana bahwa kejahatan/ delik politik bukan istilah yuridis, melainkan hanya merupakan istilah/ sebutan umum (*Public Term*) dan istilah/ sebutan teoritik ilmiah (*Scientific Term*).²¹ Mengenai pengertian yuridis mengenai kejahatan politik sama sekali tidak ditemukan didalam peraturan perundang-undangan. Hanya saja ada disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi, yang pada

²⁰ *Ibid.*, hlm. 47.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, *Op.cit.*, hlm. 185.

Pasal 5 ayat (1) menyebutkan “Ekstradisi tidak dilakukan terhadap **kejahatan politik**” (cetak tebal oleh peneliti). Selain itu, pada beberapa perjanjian ekstradisi yang telah diratifikasi dan disahkan melalui undang-undang juga dipergunakan istilah kejahatan politik tanpa menyebutkan pengertian yuridis kejahatan politik.

3. Delik Politik bernuansa *Cyber Crime*

Dimensi lain dari kejahatan terhadap Pancasila melalui teknologi internet ialah masuknya perbuatan ini menjadi bagian dari *cyber crime*. Dasar pernyataan ini diacukan pada pengertian *cyber crime* secara luas yang “mencakup kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan sarana komputer.”²² Kejahatan terhadap Pancasila maupun kejahatan konvensional lainnya yang menggunakan teknologi internet lazimnya menggunakan komputer. Hal ini tentu semakin mempertegas bahwa kejahatan terhadap Pancasila melalui sarana internet merupakan salah satu jenis *cyber crime* yang berdimensikan kejahatan politik atau sebaliknya.

Ancaman kejahatan terhadap Pancasila sebagai ideologi Negara melalui teknologi internet merupakan salah satu ekses negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin mempermudah dan mempercepat komunikasi dan informasi tanpa batas. Secara nyata penggunaan teknologi internet telah membentuk

²² Widodo, *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime Alternatif Ancaman Pidana kerja sosial dan Pidana Pengawasan Bagi Pelak Cyber crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009, hlm. 22.

masyarakat dunia baru yang tidak lagi dihalangi oleh batas-batas teritorial suatu negara yang dahulu ditetapkan sangat esensial sekali yaitu dunia maya, dunia yang tanpa batas atau realitas virtual (*virtual reality*). Inilah sebenarnya yang dimaksud dengan *Borderless World*.²³

Penyebarluasan informasi dan gerakan yang berusaha menegasikan Pancasila dilaksanakan tidak dengan penyebarluasan ajaran dan ideologi secara langsung atau konvensional, seperti melalui selebaran atau berkumpul secara langsung. Hal ini dianggap sangat susah dikembangkan dan mudah terendus oleh komponen sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, gerakan dibangun dengan menggunakan teknologi internet yang dianggap lebih mudah diakses dan lebih aman dari pengawasan organ negara, khususnya lagi di era keterbukaan informasi saat ini. Dalam kategori ini, menurut Donn Parker sebagaimana dikutip Abdul Wahid dan Mohamad Labib, bentuk perbuatan ini menjadikan komputer sebagai simbol. Suatu komputer digunakan sebagai simbol untuk melakukan penipuan dan ancaman.²⁴ Hadirnya *space* di internet seolah dijadikan *web site* biasa untuk keperluan akademis, namun ditujukan untuk doktrinasi terhadap perlawanan pada Pancasila yang melahirkan ancaman pada ideologi negara.

²³ Onno W. Purbo dalam Agus Raharjo, *Cybercrime, Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bahkti, Bandung, 2002, hlm. 5

²⁴ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 67.

Selain itu, kondisi tersebut jelas sangat mempermudah lahirnya bentuk-bentuk kejahatan terhadap ideologi Negara yang memanfaatkan kecanggihan teknologi. Hal ini juga semakin memperluas celah adanya campur tangan asing dalam usaha mengambil bagian mengganggu stabilitas Negara melalui gangguan pada Pacasila. Kecepatan pertukaran informasi, penyatuan keorganisasian yang memiliki latar belakang ideologi maupun kontruksi berpikir yang sama mempersingkat waktu komunikasi antar pihak yang berlainan negara. Hal ini belum lagi dengan indikasi-indikasi, dimana selama ini gerakan-gerakan ekstrimis radikal di Indonesia sering mendapat bantuan asing, dengan tendensi ekonomi, politik maupun lainnya yang bertujuan ikut campur dalam terselenggaranya kehidupan politik dalam negeri.

Memperhatikan permasalahan *cyber crime* yang melepaskan batas-batas territorial suatu Negara, maka secara umum *cyber crime* bukanlah permasalahan nasional semata, tetapi juga masuk sebagai salah satu permasalahan global (internasional). Oleh karena itulah, permasalahan *cyber crime* sering dibicarakan di forum internasional. Kongres PBB mengenai "*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*" (yang sejak kongres XI/ 2005 berubah menjadi *Congress on Crime Prevention and Criminal Justice*) telah membahas masalah ini sampai tiga kali, yaitu pada Kongres VIII/ 1990 di

Havana, Kongres X/2000 di Wina, dan terakhir XI/2005 (tanggal 18-25 April).²⁵

Dalam menghadapi permasalahan *cyber crime*, Indonesia telah mensahkan salah satu Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya (*cybercrime*) yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Undang-Undang ini bertujuan untuk mengharmonisasikan dan mensinergikan antara instrumen peraturan hukum nasional dengan instrumen-instrumen hukum internasional yang mengatur teknologi informasi diantaranya, yaitu *The United Nations Commissions on International Trade Law* (UNCITRAL), *World Trade Organization* (WTO), Uni Eropa (EU), APEC, ASEAN, dan OECD. Masing-masing organisasi mengeluarkan peraturan atau model *law* yang mengisi satu sama lain. Instrumen hukum internasional ini juga telah diikuti oleh beberapa negara, seperti: Australia (*The cyber crime act 2001*), Malaysia (*Computer Crime Act 1997*), Amerika Serikat (*Federal legislation: update April 2002 UNITED STATES CODE*), Kongres PBB ke 8 di Havana, Kongres ke X di Wina, kongres XI 2005 di Bangkok, berbicara tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offender*. Dalam Kongres PBB X tersebut dinyatakan bahwa negara-negara anggota harus berusaha melakukan harmonisasi ketentuan ketentuan yang berhubungan

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm/ V.

dengan kriminalisasi, pembuktian dan prosedur (*States should seek harmonization of relevant provision on criminalization, evidence, and procedure*) dan negara-negara Uni Eropa yang telah secara serius mengintegrasikan regulasi yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi ke dalam instrumen hukum positif (*existing law*) nasionalnya.²⁶

Berdasarkan uraian yang berkaitan dengan *cyber crime* dan kejahatan terhadap Pancasila di atas, terlihat jelas bahwa sarana internet dapat disalahgunakan sebagai alat penyebaran dan pembobolan sistem keamanan komputer yang diikuti manipulasi informasi yang ditujukan menyerang eksistensi Pancasila. Hal inilah yang menyebabkan kejahatan terhadap Pancasila yang merupakan kejahatan politik saling tarik menarik dengan tindak pidana mayantara yang identik dengan tindak pidana di ruang siber (*cyber space*) atau yang biasa dikenal dengan istilah "*cyber crime*".²⁷ Kondisi *cyber space* (ruang siber) itu bersifat global, artinya tidak terikat yurisdiksi nasional suatu negara.²⁸ Hal ini yang menyebabkan juga pertanggungjawaban terhadap kejahatan terhadap Pancasila yang menggunakan sarana internet melepaskan yurisdiksi negara yang menjadi ciri khas pada *cyber crime*.

²⁶ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang informasi dan transaksi elektronik

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 239.

²⁸ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Op.cit.*, hlm. 69.

Sebagai penutup sub bab ini, peneliti hendak menegaskan bahwa kejahatan terhadap ideologi Negara, baik yang dilakukan secara konvensional maupun menggunakan teknologi internet merupakan tindakan yang didasari oleh pemikiran dan keyakinan tertentu sehingga tidak bisa disamakan dengan kejahatan biasa, bahkan jika dilihat dari sudut tertentu patut dihormati. Oleh karena itu, patut kiranya terhadap penjahat politik dilakukan modifikasi pengaturan mengenai penggunaan sarana penal dan non penal dalam penggunaan kebijakan penanggulangan kejahatan.

F. Metode Penelitian

Sebagaimana diketahui, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah penanggulangan kejahatan mayantara terhadap Pancasila sebagai ideologi Negara melalui teknologi internet, baik pada saat ini maupun untuk ke depannya. Berdasarkan hal tersebut, maka haruslah dipilih metode yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Hal ini kurang lebih seperti yang dinyatakan Robert R. Mayer dan Ernest Greenwood sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa “metode penelitian merupakan sejenis logika yang mengarahkan penelitian”.²⁹ Berdasarkan hal tersebut jelas penting adanya kesesuaian antara metode penelitian dan masalah yang akan diteliti. Metode akan mengarahkan penelitian pada hasil penelitian yang tepat dan sah

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publising, Yogyakarta, 2010, hlm 61.

(validitas), sehingga temuan tersebut dapat diujikan kembali oleh peneliti lainnya.

Pendeskripsian terhadap metode penelitian yang digunakan pada penelitian hukum ini meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

a. Metode pendekatan

Penelitian yang difokuskan pada kebijakan penanggulangan kejahatan yang terkait dengan isu hukum yang diteliti, memperlihatkan penelitian ini tidak dapat lepas dari pendekatan kebijakan. Pendekatan kebijakan mencakup pengertian yang tali temali antara pendekatan yang berorientasi pada tujuan, pendekatan yang rasional, pendekatan ekonomis dan pragmatis serta pendekatan yang berorientasi pada nilai.³⁰ Pada hakikatnya suatu kebijakan berorientasi pada pencapaian yang lebih baik (melalui pedoman yang diberikan dalam kebijakan tersebut), maka setiap kebijakan membutuhkan suatu legitimasi oleh suatu otoritas.

Sedikit berbeda dengan cara pandang kebanyakan peneliti hukum, dalam penelitian ini peneliti sama sekali tidak mengkotomikan penelitian hukum, baik yang disebutkan sebagai penelitian hukum doktrinal (normatif) atau sosiologis. Dalam merumuskan maksud dari penelitian hukum pada penelitian ini, peneliti mengutip pendapat Peter Mahmud Marzuki yang

³⁰ *Loc. cit*

menyebutkan penelitian hukum adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³¹

Dalam penelitian hukum mempergunakan beberapa pendekatan, adapun pendekatan yang dipergunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual.³² Hanya saja dengan adanya cakupan penelitian yang diarahkan menyusun kebijakan legislatif di masa yang akan datang dan perhatian pada instrumen non penal, maka penelitian hukum ini tidak lepas dari pendekatan kriminologis yang erat dengan anasir-anasir non yuridis. Oleh karena itulah, penelitian hukum ini tidak sekedar mempergunakan pendekatan penelitian hukum yang sempit sebagaimana yang telah disebutkan. Untuk mendukung argumen ini peneliti merujuk pada pendapat Sudarto yang menyebutkannya adanya metode yuridis dalam arti luas, dimana “yang dilihat itu tidak hanya hubungannya di dalam perangkat norma belaka, tetapi juga bahkan terutama dilihat pentingnya efek sosial dari pembentukan norma-norma (hukum) sehingga justru dilihat pentingnya latar belakang kemasyarakatannya.”³³

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 35.

³² Untuk lebih lanjutnya lihat *ibid.*, hlm. 93 dan 95.

³³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 5.

b. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian hukum ini ialah inferensial dan preskriptif. Tipe penelitian inferensial di sini dikarenakan penelitian diadakan untuk menelusuri variabel-variabel dan hubungan antar variabel yang diperkirakan terjadi sehubungan dengan permasalahan kebijakan penanggulangan kejahatan dan kejahatan mayantara terhadap Pancasila. Selanjutnya, yang dimaksud tipe penelitian preskriptif adalah penelitian yang ditjukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.³⁴ Tipe penelitian preskriptif di sini disesuaikan dengan sifat preskriptif ilmu hukum, dimana perbincangan tersebut biasanya diakhiri dengan memberi rumusan-rumusan tertentu.³⁵ Kegunaannya penelitian preskriptif ini untuk merumuskan atau melahirkan keharusan maupun pedoman kebijakan penanggulangan kejahatan ke depannya.

c. Jenis dan sumber data

Penelitian hukum berbasis pada bahan kepustakaan hukum atau yang sering disebutkan sebagai data sekunder. Bahan kepustakaan yang dimaksud meliputi bahan-bahan hukum dan dan bahan non hukum.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas. Bahan ini meliputi:

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010 , hlm. 10

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm. 23.

- a. peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan objek penelitian yang sifatnya mengikat
 - b. Peraturan perundang-undangan beberapa Negara asing yang berkaitan dengan penanggulangan kejahatan terhadap ideologi negara dan kejahatan dunia maya.
- 2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, bahan ini meliputi RUU KUHP, tulisan-tulisan atau pendapat para ahli hukum yang telah dipublikasikan dan doktrin-doktrin yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- 3. Bahan non hukum, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, maupun bahan kepustakaan ilmu lain yang menunjang penelitian ini. Bahan ini seperti literatur non hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, ensiklopedia, majalah maupun internet.
- d. Metode pengumpulan data

Penelitian hukum ini memusatkan perhatiannya pada data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen.
- e. Metode analisis data

Mengacu pada permasalahan dan tujuan penelitian, maka

analisis data dilakukan secara normatif komprehensif secara lengkap. Teknik penyusunan analisis diuraikan secara sistematis deduktif. Kajian normatif berupa analisis kebijakan penanggulangan kejahatan saat ini maupun yang akan datang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan lainnya yang terkait dengan permasalahan pada penelitian. Kajian normatif ini ditunjang kajian komparatif yang selanjutnya menopang konseptualisasi kebijakan legislatif yang akan datang. Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semua sudah masuk dalam analisis.³⁶

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian dibagi dalam 4 (empat) bab. Bab I berisi Pendahuluan. Selanjutnya, diikuti oleh BAB II yang berisi Tinjauan Pustaka yang menguraikan mengenai kebijakan penanggulangan kejahatan, baik yang mempergunakan sarana hukum pidana maupun sarana non penal. Pada sub bab selanjutnya dijelaskan mengenai kejahatan mayantara dan perkembangannya, yang diikuti dengan sub bab posisi ideologi negara dalam politik hukum dan pembangunan nasional. Kemudian pada bagian akhir, ditutup oleh sub bab kejahatan terhadap

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm., 127.

Pancasila melalui teknologi internet sebagai kejahatan politik dan *cyber crime*.

Setelah uraian pada bab II, maka penulisan penelitian ini masuk pada bab III yang merupakan hasil Penelitian dan Analisis. Pada sub bab pertama bab III berisikan mengenai Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Mayantara Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Negara Pada Saat Ini. Pada sub kedua, juga membahas kebijakan penanggulangan kejahatan mayantara terhadap Pancasila sebagai ideologi Negara, hanya saja untuk masa yang akan datang.

Bab IV merupakan penutup yang juga bagian akhir dari penelitian atau penulisan tesis ini. Adapun bab ini berisi kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan pada situs resmi Kementerian Pendidikan Nasional diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan.³⁷ Berdasarkan pengertian ini dapat diketahui bahwa kebijakan menduduki posisi sentral dalam berjalanya “gerak roda” Negara maupun lingkup organisasi yang lebih kecil.

Kebijakan yang dimaksud pada penelitian ini merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang juga dikenal dengan istilah kebijakan kriminal ataupun politik kriminal. Memahami apa yang dimaksud dengan kebijakan penanggulangan kejahatan, maka sudah tentu terlebih dahulu dengan cara mengetahui definisi dari peristilahan tersebut. Sudarto dalam hal ini menyebutkan 3 (tiga) pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan yang disebutkannya sebagai politik kriminil, yaitu:³⁸

1. dalam arti sempit digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;

³⁷ <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>, diakses tanggal 06 November 2011.

³⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 113-114.

2. dalam arti yang lebih luas merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. dalam arti yang paling luas merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Pada buku lainnya, Sudarto menyebutkan bahwa politik kriminal adalah “usaha yang rasional dalam menaggulangi kejahatan”.³⁹ Defenisi ini diambilnya dari dafenisi Marc Ancel yang merumuskan kebijakan kriminal sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*. Masih berkaitan dengan defenisi-defenisi politik kriminil, Sudarto juga menyebutkan bahwa penegakan norma-norma sentral ini (baca politik kriminil) dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan.⁴⁰

Selanjutnya, kebijakan kriminal dapat dilihat sebagai bagian dari upaya pencegahan kejahatan. Hal ini dapat dilihat dari pengertian *criminal policy* sebagai istilah lain dari kebijakan kriminal yang disampaikan oleh G. Peter Hoefnagels, yaitu “*the science of criminal policy is the science of crime prevention*”.⁴¹ Selain dari defenisi ini, Hoefnagels dalam bukunya *The Other Side of Criminology* juga memberikan beberapa pengertian lainnya mengenai yang dimaksud dengan kebijakan kriminal yang salah satunya, yaitu “*criminal policy is a policy of designating human behavior as crime*”.⁴² Berdasarkan kedua pengertian tersebut, dapat dirasakan ada nuansa-nuansa kriminologis yang sangat kental dan mungkin tidak dapat

³⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, op.cit., hlm. 150.

⁴⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, op.cit., hlm. 114.

⁴¹ G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Kluwer, 1973, hlm. 57. (English translation by Jan G. M. Hulsman).

⁴² *Ibid.*, hlm. 100.

dilepaskan dari kebijakan kriminal. Hal ini dapat juga dilihat dari pernyataan Hoefnagels yang menegaskan bahwa kebijakan kriminal juga terdiri dari usaha mempengaruhi baik individu maupun masyarakat dengan mempergunakan penelitian kriminologi.⁴³ Hanya saja, dalam batasan-batasan yang disebutkan Hoefnagels dapat dikorelasikan dengan teori relatif pada teori pidana yang juga memandang tujuan hukuman untuk mencegah (prevensi) kejahatan.⁴⁴

Tujuan hukuman (pidana) dalam upaya mencegah kejahatan menurut Satochid Kartanegara, yaitu:

- a. ada yang menghendaki supaya ditujukan terhadap umum, yang disebut “prevensi umum” (*algemene preventive*);
- b. ada pula yang menghendaki, supaya ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan sendiri, yaitu yang disebut “preventive khusus” (*special preventive*).⁴⁵

Dikaitkan dengan kebijakan kriminal, maka dapat dikatakan bahwa hukuman (pidana) merupakan bagian kecil dari kebijakan kriminal yang dilakukan melalui pendekatan penal. Bahkan, sebagai bagian dari upaya pencegahan kejahatan melalui sarana penal, pidana hanya masuk dalam sub bagian formulasi sub sistem pidana substantif atau sistem pidana dalam arti sempit dan masuk pada satu bagian dari tiga masalah pokok hukum pidana. Apabila memasuki ranah sistem pidana fungsional, maka pidana bukan sekedar sebagai ancaman sanksi, melainkan juga dilihat bagaimana perbuatan yang diancamkan

⁴³ Lihat G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, op.cit., 57. It also comprises the search for ways influence man and society, using the results of criminological research.

⁴⁴ Leden Marpaung, op.cit., hlm. 106.

⁴⁵ Satochid Kartanegara, op.cit., hlm. 60-61.

pidana dapat dikenakan terhadap seseorang yang disangkakan melakukan tindak pidana serta bagaimana pelaksanaan pidana tersebut dilangsungkan.

Selanjutnya dalam melihat kebijakan kriminal sebagaimana telah disebutkan di atas, diketahui bahwa pencegahan kejahatan melalui kebijakan kriminal merupakan penanggulangan kejahatan yang tidak sekedar dilakukan dengan sarana penal, melainkan juga melalui penggunaan sarana non penal. Kondisi tersebut memperlihatkan kebijakan kriminal menanggulangi kejahatan dengan suatu usaha yang sangat mendalam. Gambaran mengenai pernyataan ini dapat dilihat dari posisi kebijakan kriminal yang menjadi bagian dari *law enforcement policy* dan dalam posisi tersebut, kebijakan kriminal juga terintegrasi menjadi bagian *social policy*.

Sehubungan dengan pernyataan di atas, dapat dirujuk pada pendapat Hoefnagels yang mengemukakan:

*Criminal policy as a science of policy is part of larger policy: the law enforcement policy. ... Criminal policy is also manifest as a science and as application. The legislative and enforcement policy is in turn part of social policy.*⁴⁶

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa kebijakan kriminal dalam usaha menanggulangi kejahatan tidak hanya berkutat pada fungsi penegakan hukum secara luas melainkan juga menanggulangi kejahatan dengan memperhatikan faktor-faktor non yuridis melalui kebijakan sosial yang diorientasikan pada kesejahteraan masyarakat.

⁴⁶ G. Peter Hoefnagels, *op.cit.*, hlm 57.

Selanjutnya, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa Hoefnagels juga menyebutkan pencegahan kejahatan melalui kebijakan kriminal mempergunakan penelitian kriminologis. Hal ini sejalan dengan yang disebutkan oleh Satochid Kartanegara bahwa politik kriminal merupakan salah satu bagian dari kriminologi selain aetiologi kriminal.⁴⁷ Dalam hal ini, Satochid Kartanegara menyebutkan, *criminenele politiek* adalah ilmu yang mempelajari cara-cara pemberantasan kejahatan.⁴⁸

Pendapat yang disampaikan oleh Satochid Kartanegara ini mungkin melahirkan perdebatan mengenai posisi antara hukum pidana dan kriminologi dalam melihat posisi kebijakan criminal dalam percabangan ilmu hukum dan ilmu sosial. Hanya saja menurut peneliti tidaklah terlalu penting melakukan pengkotomian secara *rigid* antara keduanya dikarenakan dapat menimbulkan kecacatan. Dalam perspektif peneliti, krimiologi merupakan salah satu ilmu bantu bagi hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan, dikarenakan faktor-faktor non yuridis mutlak “bermain” di arena keilmuan kriminologi. Bantuan kriminologi terhadap hukum pidana dapat dilihat dari dari tiga bagian utama kriminologi yang disebutkan oleh Sutherland, yaitu:

- (1) Etiologi kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan.
- (2) Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya.
- (3) Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap terhadap kondisi-kondisi mempengaruhi perkembangan hukum pidana.⁴⁹

⁴⁷ Hal yang disampaikan Satochid Kartangeara ini identik dengan yang terurai dalam cabang *General Criminology* pada G. Peter Hoefnagels, *op.cit.*, hlm 56.

⁴⁸ Satochid Kartanegara, *op.cit.*, hlm. 16.

⁴⁹ I.S. Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm, 53.

Bantuan kriminologi ini tidak hanya diberikan kepada penggunaan hukum pidana dalam melaksanakan kebijakan atau usaha penanggulangan kejahatan, akan tetapi juga memberikan bantuan dalam penggunaan sarana non-penal. Hasil penelitian atau kajian kriminologi dapat memberikan saran untuk masuknya cabang keilmuan lain dalam upaya penanggulangan kejahatan yang memperlihatkan kejelasan bahwa kebijakan kriminal merupakan bagian yang terintegrasi dengan politik sosial, dimana permasalahan sosial turut ditanggulangi guna mencegah terjadinya kejahatan.

Keterkaitan antara kebijakan penanggulangan kejahatan atau kebijakan kriminal dengan politik sosial dapat dilihat dari “tujuan akhir atau tujuan utama dari politik sosial ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.”⁵⁰ Memperhatikan realitas yang hendak dituju dalam melaksanakan kebijakan kriminal, maka upaya penanggulangan kejahatan harus ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

- a. ada keterpaduan (integritas) antara politik kriminal dan politik sosial;
- b. ada keterpaduan (integritas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal.⁵¹

Keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial merupakan suatu hal yang penting dalam upaya penanggulangan kejahatan. Selain

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, op.cit., hlm. 2.

⁵¹ *Ibid.*, hlm .4.

itu, kedua kebijakan tersebut juga terintegrasi dengan rencana pembangunan. Dalam hal ini Sudarto mengemukakan:⁵²

Kalau toh hukum pidana akan dilibatkan maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau istilah yang lazim digunakan dalam kongres⁵³ tersebut di atas, dalam “*planning for social defence*”. “*Social defence planning*” inipun harus merupakan bagian yang integral dari rencana pembangunan nasional.

Pernyataan yang dikemukakan oleh Sudarto ini juga tersebar di berbagai berbagai Kongres PBB. Salah satunya termuat pada Kongres ke-5 tahun 1975 ditegaskan:

*The many aspects of criminal policy should be coordinated and the whole should be coordinated and the whole should be integrated into the general social policy of each country.*⁵⁴

Adapun pada Kongres ke-6 dan ke-7 PBB, hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam politik sosial sudah dijelaskan secara lebih rinci. Dalam hal ini disebutkan bahwa pencegahan kejahatan dilaksanakan dengan hal-hal yang berkaitan dengan keadaan perkembangan ekonomi, sistem politik nilai kemasyarakatan dan kebudayaan serta perubahan sosial yang berlangsung. Selain itu, kedua kongres ini juga sudah memberikan perhatian yang cukup besar pada pelaku kejahatan.

Selanjutnya di dalam *Guiding Principles for Crime Prevention and Justice in the Context of Development and a New International Economic*

⁵² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, op.cit., hlm. 96.

⁵³ Kongres yang dimaksud ialah *Forth United Nation Congress on the Prevention of the Crime and the Treatment of Offenders* yang diselenggarakan di Kyoto tahun 1970.

⁵⁴ *Fifth UN Congress, Report*, 1976, hlm. 4 dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, op.cit., hlm. 5.

Order yang dihasilkan pada Kongres ke-7 PBB di Milan dinyatakan dalam sub B mengenai *Nation development and the preverention of crime*⁵⁵

- *Systematic approach*
 15. *Crime prevention and criminal justice should not be treated as isolated problems to be tackled by simplistic, fragmentary methods, but rather as complex and wideranging activities requiring system strategies differentiated in relation to:*
 - (1) *The socio-economic, political and cultural context and circumstances of the society which they are applied;*
 - (2) *The developmental stage, with special emphasis on the changes taking place a likely to occur and the related requirements;*
 - (3) *The respective tradition and customs, make maximum and effective use of human indigenous options.*
- *Crime prevention as part of social policy*
 21. *The criminal justice system, besides being an instrument to effect control and dettrrence, should also contribute to the objective of maintaining peace and order for equitable social and economic development, redressing inequalities and protecting human rights. In order to relate crime prevention and criminal justice to national justice development target, effort should be made to secure the necessary human and materiel resources, including the allocation of adequate funding, and to utilize as much possible all relevant institutions and resources of society, thus ensuring the appropriate involvement of the community.*

Dengan memperhatikan pernyataan-pernyataan di atas dan hasil Kongres PBB lainnya, Barda Nawawi Arief menyatakan, “kebijakan penanggulangan kejahatan tidak banyak artinya apabila kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan itu sendiri justru menimbulkan faktor-faktor kriminogen dan victimogen.”⁵⁶

Selanjutnya, berdasarkan beberapa pernyataan kongres PBB, Barda Nawawi Arief juga menyampaikan jelas terlihat suatu penegasan, bahwa:

⁵⁵ *United Nations, Guiding Principles for Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development and a new International Economic Order, UN Department of Public Information, August 1988, hlm. 9-10 dalam Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, op.cit., hlm. 6-7.*

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, op.cit., hlm7.*

- a. Pembangunan itu sendiri pada hakikatnya memang tidak bersifat kriminogen, khususnya apabila hasil-hasil itu didistribusikan secara pantas dan adil kepada semua rakyat serta menunjang seluruh kondisi sosial;
- b. Namun demikian, pembangunan dapat bersifat kriminogen atau dapat meningkatkan kriminalitas apabila pembangunan itu:
 - (1) tidak direncanakan secara rasional;
 - (2) perencanaanya timpang atau tidak seimbang;
 - (3) mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral; serta
 - (4) tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang integral.⁵⁷

Dilihat dari sudut politik kriminal, “masalah strategis yang justru harus ditanggulangi ialah menangani masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.”⁵⁸ Selain memperhatikan berbagai aspek sosial dan eksekusi pembangunan serta kecenderungan terjadinya kejahatan (*crime trend*), “kebijakan integral juga berarti perlunya memperhatikan korban kejahatan.”⁵⁹ Cakupan kebijakan integral antara politik kriminal dan politik sosial di atas secara disadari atau tidak, sebenarnya juga memperlihatkan keterkaitan berlangsungnya kebijakan penal dan non penal.

Untuk mempermudah memahami hal-hal yang menjadi ruang lingkup kebijakan kriminal pada kebijakan yang menggunakan pendekatan sanksi (pidana) dan yang tidak, maka peneliti akan menguraikan masing-masing bagian dari kebijakan kriminal ini pada bagian yang berbeda. Selain itu, dari pemaparan kedua bagian kebijakan kriminal ini, maka dapat

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 8-9.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 9.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 17.

diketahui urgensi keterpaduan (integralitas) pendekatan penal dan non penal.

1. Kebijakan Hukum Pidana

Menurut Marc Ancel sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, *penal policy* adalah “suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memberi pedoman tidak hanya pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.”⁶⁰ Kebijakan hukum pidana mencakup dalam ruang lingkup yang sangat luas, hal ini tergambar dalam ruang lingkup kajian dan pendekatan yang dilakukannya. Berkaitan dengan pernyataan tersebut, dapat dilihat dari penegasan Barda Nawawi Arief yang menyatakan:

...pada hakikatnya kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif; bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.⁶¹

Disadari atau tidak kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian dari politik hukum. Hal ini tidak hanya sebatas dikarenakan politik hukum pidana mencakup pada pekerjaan pembuatan peraturan perundang-undangan. Moh. Mahfud MD secara

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 19

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 22.

eksplisit memberikan beberapa definisi politik hukum yang antara lainnya adalah “kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing dalam pemberlakuan hukum sehingga latar belakang politik tertentu dapat melahirkan hukum dengan karakter tertentu.”⁶² Dalam kesempatan lain, Moh. Mahfud MD juga menyebutkan politik hukum merupakan “upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara.”⁶³

Defenisi-defenisi di atas juga diberikan dengan memperhatikan pengertian politik hukum menurut Sudarto, bahkan Sudarto secara lengkap langsung mengaitkan pengertian politik hukum yang diberikannya dengan memperhatikan persoalan pembaharuan hukum pidana dan sumbangsih ilmu hukum terhadap politik hukum. Politik Hukum menurutnya ialah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.⁶⁴
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁶⁵

Bertolak dari pengertian di atas Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik

⁶² Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2001.

⁶³ Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, op.cit., hlm. 17.

⁶⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, op.cit., hlm. 151.

⁶⁵ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 20.

dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.⁶⁶ Sudarto juga menyatakan bahwa melaksanakan "politik hukum pidana" berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Dengan demikian, politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang baik.⁶⁷

Menurut A. Mulder sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief menyebutkan "*Strafrechtspolitik*" (istilah lain dari politik hukum pidana) mencakup garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.⁶⁸

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:⁶⁹

1. perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan
2. sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

⁶⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, op.cit., hlm25

⁶⁷ Loc. cit.

⁶⁸ Ibid., hlm. 25-26.

⁶⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana* dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 160.

Penganalisaan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial.⁷⁰ Selain itu, menangani dua masalah sentral di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).⁷¹ Konsepsi di atas, jelas melihat kebijakan hukum pidana membahas kebijakan yang berkaitan dengan kriminalisasi, dekriminalisasi, penalisasi dan depenalisasi.

Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan tidaklah terlepas dari kekurangan. Menurut M. Cherif Bassiouni sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief:

problem dari pendekatan yang berorientasi pada kebijakan adalah kecenderungan untuk menjadi pragmatis dan kualitatif serta tidak memberi kemungkinan untuk masuknya faktor-faktor subjektif, misalnya nilai-nilai, ke dalam proses pembuatan putusan hukum. Namun demikian, pendekatan yang berorientasi pada kebijakan ini menurut Bassiouni dipertimbangkan sebagai salah satu *scientific device* dan digunakan sebagai alternatif dari pendekatan dengan penilaian emosional (*the emosionally laden value judgement approach*) oleh kebanyakan badan-badan legislatif.⁷²

Dari sudut operasionalisasi/ fungsionalisasi, dalam arti bagaimana perwujudan dan bekerjanya, hukum pidana dapat dibedakan dalam tiga fase/ tahap, yaitu:

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penetapan hukum pidana mengenai macam perbuatan yang dapat dipidana dan jenis sanksi yang dapat dikenakan. Kekuasaan yang berwenang dalam melaksanakan tahap ini adalah kekuasaan legislatif/formulatif.

⁷⁰ *Loc. cit.*

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 160-161.

⁷² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, op.cit.*, hlm. 32-33.

2. Tahap Aplikasi, yaitu tahap menerapkan hukum pidana, atau penjatuhan pidana kepada seseorang atau korporasi oleh hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Yang berwenang dalam tahap ini adalah kekuasaan aplikatif/ yudikatif.
3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana atas orang atau korporasi yang telah dijatuhi pidana tersebut. Kewenangan dalam hal ini ada pada kekuasaan eksekutif/ administratif.⁷³

Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi atau tahap penetapan hukum pidana dalam perundang-undangan merupakan tahap yang paling strategis, karena dalam tahap inilah dirumuskan garis-garis kebijakan legislasi yang sekaligus merupakan landasan legalitas bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana oleh badan peradilan dan tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana.

Tahap formulasi merupakan tahap penegakan hukum *in abstracto*, sedangkan tahap aplikasi dan tahap eksekusi telah memasuki tahap *in concreto*. Barda Nawawi Arief merumuskan kebijakan formulasi adalah suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problema tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu.⁷⁴

⁷³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 99.

⁷⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, *op.cit.*, hlm. 59.

Wajar kiranya kebijakan legislatif/ formulasi juga disebut sebagai kebijakan perundang-undangan yang merupakan langkah awal di dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan sarana penal. Secara garis besar, perencanaan atau kebijakan penanggulangan kejahatan yang dituangkan dalam perundang-undangan:⁷⁵

- a. perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan;
- b. perencanaan/kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dibuat dikenakan terhadap pelaku perbuatan yang dilarang itu (baik berupa pidana atau tindakan) dan sistem penerapannya;
- c. perencanaan/ kebijakan tentang prosedur atau mekanisme sistem peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum pidana.

Urgensitas kebijakan formulasi dalam kebijakan hukum pidana, juga harus diperhatikan dengan tidak mengecilkkan dua tahapan atau fase lain yang menjadi bagian dari kebijakan ini. Tahapan aplikasi menguji keefektifan dari formulasi undang-undang dan fase eksekusi melihat efektif atau tidaknya pidana yang dijatuhkan terhadap si pelaku guna memperbaiki kondisi dirinya sehingga tidak melakukan kembali tindak pidana yang sama atau pun tindak pidana lainnya selepas menjalani pembinaan melalui pidana penjara, pidana denda atau pidana lainnya (penghitungan residiv).

⁷⁵ Barda Nawawi Arief dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, *op. cit.*, hal 198

2. Kebijakan Non Penal

Secara garis besar, Hoefnagels menyebutkan ada dua bagian besar yang dapat disebutkan sebagai bagian dari upaya non penal dalam kerangka besar kebijakan penanggulangan kejahatan atau kebijakan kriminal. Dua hal tersebut ialah pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/ mass media*).⁷⁶

Upaya penanggulangan kejahatan melalui kebijakan non penal bertugas menanggulangi kejahatan sebelum kejahatan terjadi atau bersifat preventif. Sasaran utamanya adalah “menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.”⁷⁷ Dalam hal ini Barda Nawawi Arief menyebutkan:

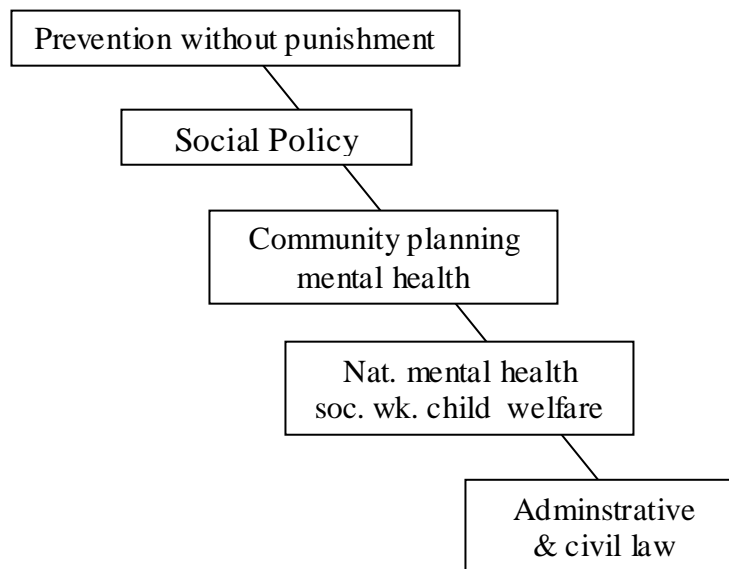
Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.⁷⁸

Pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tugas kebijakan non penal dalam mencegah kejahatan, dapat dilihat dari bagan yang disampaikan oleh Hoefnagels di bawah ini:

⁷⁶ Lihat Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana, op.cit.*, hlm. 42 dan G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology, op.cit.*, hlm. 56.

⁷⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, op.cit.*, hlm 42.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 42-43.



Berdasarkan pemahaman peneliti terhadap bagan ini, maka pekerjaan pencegahan kejahatan dilakukan dalam ruang lingkup besar *social policy* yang diturunkan melalui pekerjaan yang berhubungan erat dengan kesejahteraan masyarakat dalam politik sosial yang diturunkan melalui keterlibatan masyarakat, pendekatan peraturan perundang-undangan atau hukum yang tidak masuk cakupan atau bidang tugas hukum pidana (melalui pendekatan non sanksi).

Selanjutnya, tindakan pencegahan dalam penggunaan sarana non penal dapat dibagi menjadi tiga tipologi, yaitu:

- a. Pencegahan primer (*primary prevention*) yang diarahkan baik pada masyarakat sebagai korban potensial maupun para pelaku kejahatan yang masih belum tertangkap atau pelaku potensial. Kegiatan dalam hal ini dapat bersifat penyehatan mental masyarakat yang bersifat abstrak (*social hygiene/mental health*) maupun yang bersifat fisik dan teknologis (*tecno prevention*) misalnya saja dalam bentuk perencanaan kota (*urban crime prevention through enviromental design; CPTED*) dan sebagainya.

- b. Pencegahan sekunder (*secondary prevention*). Berbeda dengan yang pertama, pada bentuk pencegahan sekunder ini tindakan diarahkan pada kelompok pelaku atau pelaku potensial atau korban potensial tertentu. Korban potensial tertentu misalnya korban kejahatan perampokan nasabah bank, kejahatan perbankan, kejahatan pencurian kendaraan bermotor, dan sebagainya. Dalam hal ini, dapat dilakukan bentuk-bentuk prevensi baik abstrak, seperti penanaman etika profesi bagi tenaga-tenaga profesional, maupun fisik dan teknolog, misalnya pemasangan CCTV di tempat parkir kendaraan di beberapa perguruan tinggi di Australia.
- c. Pencegahan tersier (*tertiery prevention*). Dalam hal ini, langkah pencegahan diarahkan pada jenis pelaku tindak pidana tertentu dan juga korban tindak pidana tertentu, misalnya *recidivist of fender* maupun *recidivist victim*.⁷⁹

Pada tipologi tersier, sangat tipis perbedaannya dengan proses kebijakan pelaksanaan pidana melalui pembinaan terhadap pelaku kejahatan. Hanya saja dalam hemat peneliti, dalam hal ini pencegahan diarahkan secara khusus terhadap residivis dalam kehidupan bermasyarakat agar tidak lagi melakukan kejahatan yang sama selepas menjalani pidana yang pernah dijatuhkan padanya. Selain dari tiga tipologi di atas, pencegahan terhadap kejahatan dapat juga dibedakan antara:

pencegahan sosial (*socialism prevention*) yang diarahkan pada akar kejahatan, pencegahan situasional (*situational crime prevention*) yang mengarah pada pengurangan kesempatan melakukan kejahatan, dan pencegahan masyarakat (*community based prevention*) yang melakukan tindakan-tindakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengurangi kejahatan, dengan meningkatkan kemampuan masyarakat menggunakan kontrol sosial norma.⁸⁰

⁷⁹ IS. Heru Permana, *Politik Kriminal*, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2011, hlm.85-86.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 90.

Eratnya pelaksanaan kebijakan non penal dengan melangsungkan politik sosial dalam masyarakat ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Hal ini dikarenakan, cakupan politik sosial secara langsung menjangkau faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan. Kebijakan yang berorientasi seperti disebutkan Barda Nawawi Arief sebagai kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dalam pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan dilangsungkan dengan menghindari sifat kriminogen. Dalam berbagai Kongres PBB (mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*) disebutkan pembangunan dapat bersifat kriminogen apabila:

- a. tidak direncanakan secara rasional (*it was not rationally planned*), atau direncanakan secara timpang, tidak memadai, tidak seimbang (*unbalanced/ inadequately planned*);
- b. mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral (*disregarded cultural and moral values*); dan
- c. tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang menyeluruh/ integral (*did not include integrated social defence strategies*).⁸¹

Selain, menjalankan kebijakan non penal yang dilandaskan pada pelaksanaan politik sosial, sarana melalui mass media guna mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan sebagaimana dikatakan Hoefnagels dapat dilakukan dengan pemanfaatan kemajuan teknologi (*techno-prevention*), seperti

⁸¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, op.cit.*, hlm. 47. Lihat juga *Sixth UN Congress, Report*, 1981, hlm. 42 dan 54, juga pada A/COF. 12/I. 15, *UN Congress*, hlm. 2.

melalui media internet. Tidak cukup pada apa yang disampaikan oleh Hoefnagels saja, maka penguatan penggunaan sara non penal harus dilakukan “dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri”, serta digali “dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek preventif.”⁸²

Patut diketahui bahwa pentingnya pengefektifan penggunaan sarana non penal dalam mengoperasikan politik kriminal “karena masih diragukannya atau dipermasalahkannya efektivitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal.”⁸³ Hal ini terlihat, dimana masih terdapatnya gerakan-gerakan anti pidana terhadap pelaku kejahatan.

B. Kejahatan Mayantara dan Perkembangannya

Perkembangan ilmu pengetahuan membawa gerak laju masyarakat dalam pemanfaatan teknologi. Efek dari pemanfaatan teknologi menciptakan suatu tatanan masyarakat modern yang menggantungkan kehidupannya pada mesin-mesin yang bergerak tidak mutlak bergantung pada tenaga manusia. Hal ini secara sekaigus disadari ataupun tidak mendatangkan efek positif dan eksese negatif terhadap kehidupan manusia. Begitu banyak manfaat yang diberikan oleh kemajuan teknologi, seperti percepatan penyebaran informasi dan ilmu pengetahuan serta terciptanya berbagai peralatan yang memudahkan aktivitas manusia.

⁸² *Ibid.*, hlm. 50.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 51.

Hanya saja tidak dapat dipungkiri bahwa beragam manfaat yang diberikan teknologi, juga diikuti *mudhorat* bagi kehidupan manusia. Salah satu ekses negatif tersebut ialah lahirnya bentuk-bentuk kejahatan dengan pemanfaatan teknologi. *Cyber crime* merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas dunia internasional.⁸⁴

Berkaitan dengan istilah tindak pidana mayantara merupakan sinonim dari peristilahan *cyber crime*.⁸⁵ Volodymyr Golubef menyebut *cyber crime* sebagai *the new form of anti-social behaviour*. Selanjutnya, *cyber crime* juga dikenal dengan peristilahan lain, seperti “kejahatan dunia maya (*cyber space/ virtual space offence*), dimensi baru dari *hitech crime*, dimensi baru dari *transnational crime*, dan dimensi baru dari *white collar crime*.”⁸⁶

Terdapat beberapa defenisi atau pengertian terhadap istilah *cyber crime*, namun untuk mendapat pengertian yang baik maka peneliti akan menguraikan secara ringkas mengenai apa yang dimaksud dengan *cyber* dan hal yang berkaitan dengan istilah tersebut. Kata *cyber* berasal dari kata *cybernetics*, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

“suatu bidang ilmu yang merupakan perpaduan antara robotik, matematika, elektro, dan psikologi yang dikembangkan oleh Norbert Wiener di tahun 1948.” Salah satu aplikasi dari *cybernetic* adalah

⁸⁴ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, *op.cit.*, hlm.1 dan lihat juga Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, *op.cit.*, hlm. 245.

⁸⁵ Perkembangan ***cyber crime (tindak pidana mayantara)*** sering dibahas di berbagai forum internasional (cetat tebal oleh penulis). Lihat di Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, *op.cit.*, hlm. V.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm.1

bidang pengendalian (robot) dari jarak jauh. Dalam hal ini tentunya yang diinginkan adalah sebuah kendali yang betul-betul sempurna.⁸⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, disebutkan lebih lanjut bahwa *cyber* dapat dikendalikan, meskipun pengaturannya membutuhkan pendekatan yang berbeda dengan cara yang digunakan untuk mengatur dunia nyata.⁸⁸ Bila dikorelasikan dengan kebijakan penanggulangan kejahatan, maka rumusan pencegahan melalui upaya penal dan non penal harus dilakukan secara berbeda dengan bentuk kejahatan pada umumnya.

Kata *cyber* pada *cyber crime* pada dasarnya juga menunjukkan ruang terjadinya tindak pidana tersebut. Hal ini dapat dilihat dari definisi-definisi yang berkaitan dengan *cyber space*. Howard Rheingold menyatakan *cyber space* adalah sebuah “ruang imajiner” atau “maya” yang bersifat artifisial, dimana setiap orang melakukan apa saja yang biasa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara baru.⁸⁹ Adapun Agus Rahardjo menyebutkan, “*cyber space* sesungguhnya merupakan sebuah dunia komunikasi berbasis komputer (*computer mediated communication*). Dunia ini menawarkan realitas baru dalam kehidupan manusia yang disebut realitas *virtual* (maya).”⁹⁰

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa *cyber crime* dilakukan melalui dunia baru atau bukan melalui ruang konvensional, dimana komputer menjadi media utamanya, bahkan dengan semakin canggihnya zaman

⁸⁷ Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 6.

⁸⁸ *Loc. cit.*, hlm. 6.

⁸⁹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *op.cit.*, hlm. 32.

⁹⁰ Agus Rahardjo, *op.cit.*, hlm. 91.

posisi komputer dapat disubstitusikan dengan peralatan lain. Komputer dapat diartikan “peralatan elektronik, magnetic, optikal, elektrokimia atau alat pengolah data berkecepatan tinggi yang dapat melakukan penalaran, atau fungsi penyimpanan, yang meliputi fasilitas penyimpanan atau fasilitas komunikasi yang secara langsung berhubungan dengan pengoperasian peralatan secara terpadu.”⁹¹ Peralatan lain yang peneliti maksud di sini, bisa saja *smart phone* atau jenis lain yang memiliki kemampuan yang hampir sama dengan komputer.

Teknologi yang terus melekat pada *cyber crime* adalah internet, yang secara harfiah merupakan singkatan dari *interconnection-networking* yang dapat diartikan “sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar *Internet Protocol Suite* (TCP/IP) untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia.”⁹² Dengan bahasa yang lebih sederhana, Agus Raharjo memberikan pengertian internet sebagai “jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi, seperti kabel telepon, serta optik, satelit atau gelombang frekuensi.”⁹³ Pada dasarnya, internet merupakan teknologi yang didesain untuk mempermudah kelancaran komunikasi antar individu yang satu dengan yang lain dengan melepas sekat ruang.

Berdasarkan penjelasan di atas, kiranya cukuplah jelas apa yang dimaksud dengan kata *cyber* pada frasa *cyber crime*. Berkaitan dengan

⁹¹ Widodo, *op.cit.*, hlm. 25.

⁹² <http://id.wikipedia.org/wiki/Internet>, diakses tanggal 28 November 2011.

⁹³ Agus Raharjo, *op.cit.* hlm. 59.

maksud dari *crime* pada frasa tersebut merupakan persinonim dari tindak pidana. Oleh karena itu dari penjelasan dari dua kata yang membentuk frasa tersebut dapatlah ditemukan apa yang dimaksud dengan *cyber crime*. TB. Ronny R. Nltibaskara menyebutkan *cyber crime* sebagai “kejahatan yang terjadi melalui atau pada jaringan komputer di dalam internet.”⁹⁴ Pada dasarnya, “isitilah *cyber crime* merujuk pada suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyber space*) dan tindakan yang menggunakan komputer.”⁹⁵ Hanya saja, dalam merumuskan pengertian *cyber crime*, lagi-lagi ditemukan perbedaan pendapat di antara para ahli, dimana ada yang menyamakan peristilahan *cyber crime* dengan dengan tindak kejahatan komputer dan ada yang membedakan. Hanya saja dalam hal ini peneliti condong mengikuti pendapat Barda Nawawi Arief yang menyamakan antara peristilahan tersebut. Barda Nawawi Arief menyandarkan pendapatnya tersebut pada *background paper* Kongres PBB X/2000 pada dokumen A/CONF.187/10 yang menjelaskan *cyber crime* dibagi dalam dua kategori, “yaitu CC⁹⁶ dalam arti sempit (*in narrow sense*) disebut *computer crime* dan CC dalam arti luas (*in border sense*) disebut *computer related crime* (CRC).⁹⁷ Secara rinci, kedua kategori tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Cyber crime (CC) in a narrow sense (computer crime)*

⁹⁴ Widodo, *op.cit.*, hlm. 23.

⁹⁵ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *op.cit.*, hlm. 7.

⁹⁶ Barda Nawawi Arief menyingkat istilah *cyber crime* dengan CC.

⁹⁷ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkemabngan Cyber Crime di Indonesia*, *op.cit.*, hlm. 8.

any illegal behavior directed by means of electronic operation that targets the security of computer systems and the data processed by them.

2. *CC in border sense (computer related crime)*

*Any illegal behavior committed by means of, or in relation to, a computer system or network, including such crime as illegal possession, offering or distributing information by means of a computer system or network.*⁹⁸

Hanya saja patut disayangkan pada laporan kongres/ *workshop* (dokumen A/CONF.167/ 15) tidak memuat pembagian dan pengertian *cyber crime* sebagaimana disebutkan dalam *background paper*. Dalam laporan *computer related crime* disebutkan mencakup keseluruhan bentuk-bentuk baru dari kejahatan yang ditujukan pada komputer, jaringan komputer dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang sekarang dilakukan dengan menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer.⁹⁹ Memperhatikan penjelasan di atas, Barda Nawawi Arief menyimpulkan bahwa “istilah CRC dalam laporan *workshop*/ kongres X, identic dengan istilah CC dalam *background paper* untuk *workshop*.”¹⁰⁰

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, secara sederhana *cyber crime* merupakan keseluruhan kejahatan yang dapat lepas ruang teritori antar Negara melalui penggunaan fasilitas internet, baik menggunakan teknologi komputer atau peralatan lain.

Melihat dimensi *cyber crime* yang dapat menembus teritori satu Negara ke Negara lainnya dengan mudah, maka hal ini menimbulkan

⁹⁸ *Loc.cit.* Lihat juga “*Background Paper*” Kongres PBB X untuk *Workshop on crime related the computer network*, dokumen A/CONF./187/10, 3-2-2000, hlm.5.

⁹⁹ *Ibid.*, hlm.. 9. Lihat juga Dokumen A/CONF./187/L.10 (Laporan Komisi II tentang *Workshop*), 16-4-2000, hlm 1-2; dan dokumen A/CONF/187/15 (Laporan Kongres X secara keseluruhan), 19-7-2010, hlm. 26.

¹⁰⁰ Barda Nawawi Arief, *Loc.cit.*

persoalan yang berkaitan dengan yurisdiksi kejahatan yang terkategori baru ini. Yurisdiksi merupakan hal yang sangat *crucial* sekaligus kompleks khususnya dengan pengungkapan kejahatan-kejahatan di dunia maya yang bersifat internasional (*international cyber crime*).¹⁰¹

Sebelum diuraikan mengenai permasalahan yurisdiksi yang berkaitan dengan *cyber crime*, peneliti akan menguraikan terlebih dahulu yang berkaitan dengan yurisdiksi yang didasarkan pada prinsip-prinsip tradisional. Menurut Masaki Hamano sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, terdapat tiga kategori yurisdiksi tradisional, yaitu yurisdiksi legislatif (*legislative jurisdiction* atau *jurisdiction to prescribe*), yurisdiksi yudisial (*judicial jurisdiction* atau *jurisdiction adjudicate*), dan yurisdiksi eksekutif (*executive jurisdiction* atau *jurisdiction to enforce*).¹⁰²

Hal-hal yang berkaitan dengan yurisdiksi tradisional di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

...dapat dikatakan bahwa yurisdiksi tradisional berkaitan dengan batas-batas kewenangan Negara di tiga bidang penegakan hukum. *Pertama*, kewenangan pembuatan hukum substantif (oleh karena itu, disebut yurisdiksi legislatif, atau dapat juga disebut yurisdiksi formatif). *Kedua*, kewenangan mengadili atau menerapkan hukum (oleh karena itu, disebut yurisdiksi yudisial atau aplikatif). *Ketiga*, kewenangan melaksanakan/ memaksakan kepatuhan hukum yang dibuatnya (oleh karena itu, disebut yurisdiksi eksekutif).¹⁰³

Berkaitan dengan yurisdiksi pada kejahatan mayantara, disebut dengan peristilahan *cyber jurisdiction*. Dalam hal ini, Masaki Hamano sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief membedakan pengertian

¹⁰¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elistaris Gultom, *op.cit.*, hlm. 23.

¹⁰² *Ibid.*, hlm27-28.

¹⁰³ *Ibid.* hlm. 28.

cyber jurisdiction dari sudut pandang dunia *cyber/ virtual* dan dari sudut hukum. Pengertian mengenai *cyber jurisdiction* ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dari sudut dunia virtual, *cyber jurisdiction* sering diartikan sebagai kekuasaan sistem operator dan para pengguna (*users*) untuk menetapkan aturan dan melaksanakannya pada suatu masyarakat di ruang *cyber/ virtual*. Dari sudut hukum, *cyber jurisdiction* atau *jurisdiction in cyber space* adalah kekuasaan fisik pemerintah dan kewenangan pengadilan terhadap pengguna internet atau terhadap aktivitas mereka di ruang *cyber* (*physical government's power and court's authority over Netusers or their activity in cyber space*).¹⁰⁴

Selanjutnya, posisi penting permasalahan yurisdiksi dalam penegakan hukum pidana (baik secara luas maupun sempit) ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat nasional maupun internasional. Perlindungan ini dilaksanakan guna menegaskan bahwa “*cyber space* bukannya suatu wilayah aman di luar bumi (*extraterrestrial safetyzone*); para penjahat dan pelanggar penyalahgunaan jabatan tidaklah aman dari pengadilan karena suatu immunitas di luar dirinya (*out of body immunity*).”¹⁰⁵

Berkaitan dengan luasnya batasan yurisdiksi pada *cyber crime* yang dapat menembus batas-batas teritori satu negara ke negara lainnya menyebabkan adanya kelemahan mendasar berhubungan dengan masalah yurisdiksi. Menyandarkan pendapatnya pada pernyataan Masaki Hamano, Barda Nawawi Arief menyatakan, “sistem hukum dan yurisdiksi nasional/ teritorial memang mempunyai keterbatasan karena tidaklah

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 29.

¹⁰⁵ Lessig dalam Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, op.cit., hlm. 31.

mudah menjangkau pelaku tindak pidana di ruang *cyber* yang tidak terbatas itu.”¹⁰⁶

Adanya *cyber crime* bermuara pada lahirnya perkara-perkara pidana yang tidak lepas dari persoalan penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap *cyber crime* secara umum juga memiliki keterkaitan dengan yurisdiksi hukum pidana nasional suatu negara. Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, yurisdiksi ini berhubungan langsung dengan asas-asas tentang berlakunya hukum pidana menurut tempat (*de beginsel van de werking der strafwet naar de plaats*). Asas-asas yang dimaksud ini sebagaimana disebutkan P.A.F. Lamintang yang dikutipnya dari para ahli hukum pidana (Simons, van Hammel, van Hattum, Noyon, Suringa, Langemeijer dan Pompe) ialah: ¹⁰⁷

1. Asas teritorial atau *teritorialiteits-beginsel* atau juga yang disebut *lands-beginsel*.

Menurut asas teritorial, berlakunya Undang-undang Pidana suatu negara semata-mata digantungkan pada tempat di mana suatu tindak pidana itu telah dilakukan, dan tempat tersebut haruslah terletak di dalam wilayah negara bersangkutan.

Berlakunya yurisdiksi teritorial ini tidak mutlak hanya terhadap tindak pidana yang dilakukan di dalam batas-batas wilayah suatu negara. Adakalanya pelaku tindak pidana melakukan sebagai unsur tindak pidananya di luar wilayah negara yang bersangkutan sehingga memperluas berlakunya yurisdiksi.¹⁰⁸

2. Asas kebangsaan atau *nationaliteits-beginsel* atau juga disebut *perseonaliteits-beginsel* atau *actieve persoonlijkheidsstelsel* atau *actieve nationaliteits-beginsel* atau yang juga disebut *subjektionprinzip*.

Menurut asas kebangsaan Undang-undang Pidana suatu negara tetap dapat diberlakukan terhadap warga negaranya di manapun

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm 31-32.

¹⁰⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.89-90, 97, 107 dan 113.

¹⁰⁸ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *op.cit.*, hlm. 35.

mereka itu berada, bahkan juga seandainya mereka berada di luar negeri.

3. Asas perlindungan atau *beschermings-beginsel* atau juga disebut *passief nationaliteits-beginsel* atau *realprinzip* atau juga disebut *passief nationaliteits-beginsel* atau *schutzprinzip* atau yang oleh Profesor Simons juga disebut *prinzip der beteltingten rechtsordnung* dan

Menurut asas perlindungan, berlakunya Undang-undang pidana suatu negara itu tidak bergantung pada tempat seorang pelaku telah melakukan tindak pidananya, melainkan pada kepada kepentingan hukumnya yang menjadi sasaran tindak pidana itu. Dan negara yang kepentingan hukumnya menjadi sasaran tindak pidana itu berwenang menghukum pelaku tindak pidana itu.

4. Asas persamaan atau *universaliteits-beginsel* atau juga disebut *wetsrafpflege* atau yang oleh Profesor van Hammel juga disebut *weltrechtspflege*.

Menurut asas persamaan setiap negara mempunyai kewajiban untuk turut serta dalam usaha memelihara keamanan dan ketertiban dunia dengan negara-negara lain.

5. Wewenang untuk melaksanakan yurisdiksi universal dimiliki tiap negara tanpa melihat siapa pelakunya dan tanpa melihat dimana tindak pidana dilakukan. Persyaratan mengenai sifat tindak pidana tersebut sebagai *serious crime* harus terpenuhi sehingga tindak pidana itu memiliki karakter membahayakan masyarakat internasional. Dengan demikian ada dasar pembenaran bahwa pelaksanaan yurisdiksinya tidak diserahkan pada satu negara saja tetapi menjadi hak setiap negara secara universal.¹⁰⁹

Berangkat dari penjelasan di atas diketahui yurisdiksi negara yang dimaksudkan masih dalam pengertian konvensional, yang prinsip-prinsipnya telah diakui oleh hukum Internasional didasarkan pada batas-batas geografis, sementara komunitas multimedia bersifat internasional, multi yurisdiksi dan tanpa batas, sehingga sampai saat ini belum dapat ditentukan secara pasti bagaimana yurisdiksi suatu negara atau suatu

¹⁰⁹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *op.cit.*, hlm. 35-36.

forum yang berlaku terhadap komunikasi multimedia sebagai salah satu pemanfaatan teknologi informasi.¹¹⁰

Mengacu pada *Article 22 Convention on Cyber Crime* diberikan sebuah panduan khusus untuk mencapai unifikasi persoalan yurisdiksi pada *cyber crime*. *Article* ini menyatakan sebagai berikut:

1. Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish jurisdiction over any offence established in accordance with Articles 2 through 11 of this Convention, when the offence is committed:
 - a. in its territory; or
 - b. on board a ship flying the flag of that Party; or
 - c. on board an aircraft registered under the laws of that Party; or
 - d. by one of its nationals, if the offence is punishable under criminal law where it was committed or if the offence is committed outside the territorial jurisdiction of any state.
2. Each Party may reserve the right not to apply or to apply only in specific cases or conditions the jurisdiction rules laid down in paragraphs 1.b through 1.d of this article or any part thereof.
3. Each Party shall adopt such measures as may be necessary to establish jurisdiction over the offences referred to in Article 24, paragraph 1, of this Convention, in cases where an alleged offender is present in its territory and it does not extradite him or her to another Party, solely on the basis of his or her nationality, after a request for extradition.
4. This Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised by a Party in accordance with its domestic law.
5. When more than one Party claims jurisdiction over an alleged offence established in accordance with this Convention, the Parties involved shall, where appropriate, consult with a view to determining the most appropriate jurisdiction for prosecution.

Memperhatikan hal-hal yang diharapkan ketentuan di atas berkaitan dengan yuridiksi pada *cyber crime*, maka kejahatan ini dapat dikategorikan sebagai salah satu kejahatan transnasional (*transnational crime*) dan tunduk pada asas universalitas pada hukum pidana. Istilah

¹¹⁰ Tien S. Saefullah, *Yurisdiksi Sebagai Upaya Penegakan Hukum Dalam Kegiatan Cyberspace*, dalam *Cyber Law : Suatu Pengantar*, (ELIPS: Jakarta), 2002, hlm. 96.

kejahatan transnasional dikemukakan pertama kali dalam *United Nations Convention Against Transnational Crime* tahun 2006 dimana istilah tersebut dikaitkan dengan yurisdiksi negara dalam menghadapi suatu kejahatan.¹¹¹ Selanjutnya, Boister sebagaimana dikutip Eddy O.S. Hiariej menyebutkan:

Transnational crime sebagai suatu konsep generik yang mencakup bentuk kegiatan kriminal adalah suatu konsep kriminologi sosiologis dan bukan konsep yuridis. Boister selanjutnya mendefenisikan *transnational crime* sebagai "..... *certain criminal phenomena transcending international border, transgressing the laws of national states or having an impact on another country...*" Boister kemudian menyimpulkan bahwa secara sederhana kejahatan transnasional adalah "*conduct that has actual or potential trans-boundary effect or national and international concerns*".¹¹²

Posisi *cyber crime* sebagai salah satu kejahatan transnasional, dapat dilihat dari masuknya kejahatan ini ke dalam pengelompokan kejahatan transnational pada beberapa regulasi internasional. Dalam hal ini peneliti hanya mengambil dua sampel untuk menguatkan posisi *cyber crime* sebagai kejahatan transnasional. Pertama, *Unites Nation Convention Against Transnational Organized Crime (Palermo Convention)* November 2000 menetapkan bahwa kejahatan-kejahatan yang termasuk *transnational crime* adalah:

1. Kejahatan narkoba;
2. Kejahatan *Genocide*;
3. Kejahatan uang palsu;
4. Kejahatan di laut bebas;
5. **Cyber crime. (cetak tebal peneliti)**

¹¹¹ Eddy O.S. Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm. 47.

¹¹² *Ibid.*, hlm. 47-48.

Kedua, dapat dilihat dari Deklarasi Manila yang menyebutkan 8 kejahatan yang masuk sebagai kejahatan transnasional, yaitu:

1. *Illicit Drug Trafficking*;
2. *Money laundering*;
3. *Terorism*;
4. *Arm smuggling*;
5. *Trafficking in Persons*;
6. *Sea piracy*;
7. *Currency Counterfeiting*;
8. ***Cyber Crime***. (cetak tebal peneliti)

Dengan masuknya *cyber crime* pada kelompok kejahatan transnasional, sedikit banyak memang menyelesaikan permasalahan yurisdiksi kejahatan ini. Hanya dalam penegakan hukumnya, pelaku *cyber crime* bisa saja lepas dari jerat hukuman. Pengakuan kejahatan ini sebagai kejahatan transnasional tentunya harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum pidana internasional dalam penegakan hukumnya. Sebagai contoh, ketika harus dilakukan ekstradisi terhadap penjahat dunia maya guna dikenakan ketentuan hukum pidana nasional haruslah terdapat pengaturan yang sama terhadap tindak pidana yang dimaksud. Dalam hal ini, Sutan Remy Syahdeini menyebutkan¹¹³

dalam hukum internasional berlaku ketentuan bahwa tidak seorangpun dapat secara sah diekstradisi dari suatu negara untuk menghadapi tuntutan di negara lain kecuali apabila negara menganut kriminalitas ganda (*dual criminality*¹¹⁴).” Artinya, suatu tindak pidana harus dianggap diakui oleh kedua negara hukum negara tersebut dan sama tingkatannya dalam jenis tindak pidananya (*same level of criminality*).

¹¹³ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan Tindak Pidana omputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 29.

¹¹⁴ *Dual Criminality* juga disebutkan dalam istilah *double criminality*.

Kelemahan ini sebenarnya dapat ditutupi oleh penggunaan asas atau prinsip ubikuitas (*the principle of ubiquity*). Prinsip ubikuitas adalah prinsip yang menyatakan bahwa delik-delik yang dilakukan/ atau terjadi sebagian di wilayah teritorial negara dan sebagian di luar teritorial suatu negara harus dapat dibawa ke yurisdiksi setiap negara yang terkait.¹¹⁵ Asas ini sedikit berbeda dengan asas universalitas, dimana asas ubikuitas memberikan kewenangan bagi setiap negara untuk mengadili pelaku selama akibat perbuatan dirasakan oleh negara yang bersangkutan tanpa melihat norma hukum internasional yang dilanggarnya. Patut disayangkan, prinsip ubikuitas ini tidak diatur dalam dalam *Convention on Cyber Crime* di Budapest 23 November 2011. Pengadopsian prinsip ini sebenarnya pernah direkomendasikan dalam *International Meeting of Expert on the Use of Criminal Sanction, Domestically and Regional* di Portland, Oregon, USA pada 19-23 Maret 1994.¹¹⁶ Pengaturan prinsip ini sebenarnya diharapkan dapat menghadapi kendala *cyber crime* yang menembus teritori satu negara ke negara lainnya dengan mudah. Hanya saja, ketika berhadapan dengan *cyber crime* yang berkaitan dengan kejahatan politik, patut juga dipertanyakan kemampuan prinsip ini mengatasi permasalahan yurisdiksi. Berkaitan dengan hal tersebut, akan dikupas lebih jauh pada bab selanjutnya, sedangkan pada bagian ini

¹¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, op.cit., hlm. 36.

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 36.

hanya dikupas secara sederhana ketika menguraikan bentuk-bentuk perbuatan yang masuk kategori tindak pidana mayantara.

Berkaitan pengaturan *cyber crime* pada hukum nasional diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, dimana hal yang berkaitan dengan yurisdiksi disebutkan secara umum pada Pasal 2 dan secara khusus pada Pasal 37. Secara rinci Pasal-Pasal tersebut menyebutkan:

Pasal 2

Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, **baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.**

Penjelasan Pasal 2

Undang-Undang ini **memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal.**

Yang dimaksud dengan “merugikan kepentingan Indonesia” adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia.

Pasal 37

Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 **di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.**

Berdasarkan bunyi pada Pasal-Pasal di atas (khususnya cetak tebal peneliti), secara jelas Undang-Undang 11 tahun 2008 mengadopsi asas

teritorial yang diperluas dengan penggunaan asas universalitas. Selanjutnya, hal ini dipertegas dengan Pasal 37 yang mengatur berlakunya perbuatan yang dilarang oleh Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 pada Undang-Undang ini berlaku yurisdiksi Indonesia walaupun berada di luar teritori Indonesia.

Selain diatur melalui tata cara penggunaan internet menggunakan instrumen hukum formal, para *netter* juga memberikan aturan dalam penggunaan internet yang biasa disebut dengan netiket atau *netiquette*.

Beberapa aturan yang ada pada *netiquete* ini adalah:

1. Amankan dulu diri anda, maksudnya adalah amankan semua properti anda, dapat dimulai dari mengamankan komputer anda, dengan memasang anti virus atau personal firewall
2. Jangan terlalu mudah percaya dengan Internet, sehingga anda dengan mudah mengunggah data pribadi anda. dan anda harus betul-betul yakin bahwa alamat URL yang anda tuju telah dijamin keamanannya.
3. dan yang paling utama adalah, hargai pengguna lain di internet, caranya sederhana yaitu:
 - a. jangan biasakan menggunakan informasi secara sembarangan, misalnya plagiat.
 - b. jangan berusaha untuk mengambil keuntungan secara ilegal dari Internet, misalkan melakukan kejahatan pencurian nomor kartu kredit.
 - c. jangan berusaha mengganggu privasi orang lain, dengan mencoba mencuri informasi yang sebenarnya terbatas.
 - d. jangan menggunakan huruf kapital terlalu banyak, karena menyerupai kegiatan teriak-teriak pada komunitas sesungguhnya.
 - e. jangan *flaming* (memanas-manasi), *trolling* (keluar dari topik pembicaraan) ataupun *junking* (memasang post yang tidak berguna) saat berforum.¹¹⁷

¹¹⁷ <http://id.wikipedia.org/wiki/Netiquette>

Para netter di Indonesia juga membuat semacam seruan dalam bentuk “Acuan Umum Etika Online” yang sering dikenal dengan naskah tebet 16 September 2011. Naskah ini secara umum menyatakan:

Siapapun tanpa terkecuali, ketika online (menggunakan Internet), harus menjunjung tinggi dan menghormati:

1. nilai kemanusiaan
2. kebebasan berekspresi
3. perbedaan dan keragaman
4. keterbukaan dan kejujuran,
5. hak individu atau lembaga
6. hasil karya pihak lain
7. norma masyarakat
8. tanggung-jawab¹¹⁸

Setelah diuraikan mengenai definisi dan persoalan dasar yang berkaitan erat dengan *cyber space* dan *cyber crime*, maka selanjutnya peneliti akan mulai menguraikan jenis-jenis kejahatan yang masuk ruang lingkup *cyber crime*. Mengacu pada *Convention on Cyber Crime*, disebutkan jenis-jenis kejahatan mayantara tersebut, terdiri dari:

1. *Illegal access (Article 2);*
2. *Illegal interception (Article 3);*
3. *Data interference (Article 4);*
4. *System interference (Article 5);*
5. *Misuse of devices (Article 6);*
6. *Computer-related forgery (Article 7);*
7. *Computer related fraud (Article 8);*
8. *Offences related to child pornography (Article 9);*
9. *Offences related to infringements of copyrights and related rights (Article 10);*
10. *Attempt and aiding or abetting (Article 11).*

Pada *Article 22* mengenai yurisdiksi pada paragraf 1 nya disebutkan bahwa tindak pidana yang menjadi bagian yurisdiksi pada konvensi ini mencakup pada *article 2* sampai dengan *article 11*. Berkaitan dengan

¹¹⁸ <http://jogloabang.com/content/naskah-tebet>, diakses tanggal 10 April 2012.

Article 11 disebutkan bahwa negara dalam kebijakan legislatifnya harus menetapkan mencoba menolong dan pembantuan secara sadar pada tindak pidana yang diatur pada *Article* 2 sampai *Article* 10 sebagai tindak pidana.

Selanjutnya, pada salah satu makalah yang berkaitan dengan etika berinternet, disebutkan *cybercrime* berdasarkan jenis aktivitasnya dibedakan menjadi:¹¹⁹

1. *Unauthorized Access.*

Terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu system jaringan computer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik system jaringan computer yang dimasukinya.

Probing dan *Port Scanning* merupakan contoh dari kejahatan ini. Aktivitas “Port scanning” atau “probing” dilakukan untuk melihat servis-servis apa saja yang tersedia di server target.

2. *Illegal Contents*

Merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

3. *Penyebaran Virus Secara Sengaja*

Penyebaran virus umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Seringkali orang yang system emailnya terkena virus tidak menyadari hal ini. Virus ini kemudian dikirimkan ke tempat lain melalui emailnya.

Contoh kasus : Virus Mellisa, *I Love You*, dan Sircam.

4. *Data Forgery*

Kejahatan jenis ini bertujuan untuk memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di Internet.

5. *Cyber Espionage, Sabotage and Extortion*

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki system jaringan computer pihak sasaran.

Selanjutnya, sabotage and extortion merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau

¹¹⁹ Tri Adriansyah dan Eki Putrianti, *Contoh Etika Profesi di Bidang IT*, <http://images.ekiazalah.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/SemGgAoKClAAADNiFa81/ETIKA%20PROFESI%20DI%20BIDANG%20IT.doc?nmid=232398605>, diakses tanggal 3 Desember 2011, hlm. 18-19.

penghancuran terhadap suatu data, program computer atau system jaringan computer yang terhubung dengan internet.

6. *Cyberstalking*

Dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan computer, misalnya menggunakan e-mail dan dilakukan berulang-ulang.

Kejahatan tersebut menyerupai terror yang ditujukan kepada seseorang dengan memanfaatkan media internet.

7. *Carding*

Merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet.

8. *Hacking dan Cracking*

Istilah *hacker* biasanya mengacu pada seseorang yang mempunyai minat besar untuk mempelajari *system computer* secara detail dan bagaimana meningkatkan kapabilitasnya.

Besarnya minat yang dimiliki seorang *hacker* dapat mendorongnya untuk memiliki kemampuan penguasaan system di atas rata-rata pengguna. Jadi, hacker memiliki konotasi yang netral.

Aktivitas *cracking* di internet memiliki lingkungan yang sangat luas, mulai dari pembajakan account milik orang lain, pembajakan situs web, probing, menyebarkan virus, hingga pelumpuhan target sasaran.

9. *Cybersquatting and Typosquatting*

Merupakan kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal.

Typosquatting adalah kejahatan dengan membuat domain yang mirip dengan nama domain orang lain.

10. *Hijacking*

Merupakan kejahatan melakukan pembajakan hasil karya orang lain. Yang paling sering terjadi adalah Software Piracy (pembajakan perangkat lunak)

11. *Cyber Terrorism*

Suatu tindakan *cybercrime* termasuk *cyber terrorism* jika mengancam pemerintah atau warganegara, termasuk cracking ke situs pemerintah atau militer.

Hal yang patut disayangkan dalam uraian mengenai jenis-jenis *cyber crime* berdasarkan aktivitasnya tersebut tidak menyebutkan sumber yang rinci dalam penulisan makalah tersebut. Berdasarkan rujukan lain, NCIS

Inggris sebagaimana dikutip oleh Ade Marman Suherman disebutkan bahwa manifestasi tindak kejahatan *cyber crime* muncul dalam berbagai macam dan varian seperti sebagai berikut:¹²⁰

1. *Recreational Hackers*. Kejahatan ini dilakukan oleh *netter* tingkat pemula untuk sekedar mencoba kekurangan handalan sistem sekuritas suatu perusahaan.
2. *Crackers* atau *criminal minded hackers*, pelaku kejahatan ini biasanya memiliki motivasi untuk mendapatkan keuntungan finansial, sabotase dan pengrusakan data. Tipe kejahatan ini dapat dilakukan dengan bantuan orang dalam, biasanya staf yang sakit hati, atau datang dari kompetitor dalam bisnis sejenis.
3. *Political hackers*. Aktivis politis atau lebih populer dengan sebutan *hacktivist* melakukan perusakan terhadap ratusan situs *web* untuk mengkampanyekan programnya, bahkan tidak jarang dipergunakan untuk menempelkan pesan untuk mendeskreditkan lawannya. Usaha tersebut pernah dilakukan secara aktif dan efisien untuk kampanye anti-Indonesia dalam masalah Timor Timur yang dipelopori oleh Ramos Horta.
4. *Denial of Service Attack*. Serangan *denial of service attack* atau oleh FBI dikenal dengan istilah "*unprecedented*" tujuannya adalah untuk memacetkan sistem dengan mengganggu akses dari pengguna yang *legitimated*. Taktik yang digunakan adalah dengan membanjiri situs *web* dengan data yang tidak penting. Pemilik situs akan banyak menderita kerugian karena untuk mengendalaikan atau mengontrol kembali situs *web* memakan waktu lama.
5. *Insider* atau *internal hacker*. Kejahatan ini bisa dilakukan oleh orang dalam perusahaan sendiri. Modusnya dengan menggunakan karyawan yang kecewa atau bermasalah dengan perusahaannya.
6. *Virues*. Program pengganggu (*malicious*) dengan penyebaran virus dewasa ini dapat menular melalui aplikasi internet. Sebelumnya pola penularan virushanya melalui *floppy disk*. Virus dapat bersembunyi dalam *file* dan ter-*download* oleh *user* bahkan bisa menyebar melalui kiriman *e-mail*.
7. *Piracy*. Pembajakan *software* merupakan trend dewasa ini. Pihak produsen *software* dapat kehilangan profit karena karyanya dapat dibajak melalui *download* dari internet dan dikopi ke dalam *CD-room* yang selanjutnya diperbanyak secara *illegal* tanpa seizin pemilik (penciptanya).

¹²⁰ Abdulah Wahid dan Mohammad Labib, *op.cit.* h/m. 70-72.

8. *Fraud*. Ini adalah sejenis manipulasi informasi keuangan dengan tujuan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Sebagai contoh harga saham yang menyesatkan melalui rumor, situs lelang fiktif dan sebagainya.
9. *Gambling*. Perjudian di dunia *cyber* yang berskala global. Dari kegiatan ini dapat diputar kembali di negara yang merupakan *tax heaven*, seperti *Cyprus* merupakan surga bagi *money laundering*, bahkan termasuk Indonesia sering dijadikan sebagai negara tujuan *money laundering*.
10. *Pornography and Paedophilia*. Dimana *cyber* selain meniadakan berbagai kemudahan dengan mengatasi kendala ruang dan waktu juga telah menghadirkan dunia pornografi anak di bawah umur.
11. *Cyber-Stalking*. Adalah segala bentuk kiriman *e-mail* yang tidak dikehendaki user.
12. *Hate sites*. Situs ini sering digunakan untuk saling menyerang dan melontarkan kata-kata tidak sopan dan vulgar yang dikelola oleh para ekstrimis. Penyerangan terhadap lawan sering menggunakan isu rasial, perang program dan promosi kebijakan atau suatu pandangan.
13. *Criminal communications*. NCIS mendeteksi bahwa internet telah dijadikan sebagai alat yang handal dan modern untuk melakukan komunikasi antar gengster, anggota sindikat obat bius dan komunikasi antar *hooligan* di dunia sepak bola.

Sebagai bentuk kejahatan yang dapat terkategori baru, karakteristik *cyber crime* berbeda dengan kejahatan (tradisional) lainnya. Berdasarkan bentuk-bentuk kejahatan mayantara di atas, maka secara umum dapat diketahui yang menjadi ciri-ciri kejahatan ini adalah:

1. *Non-violence* (tanpa kekerasan);
2. Sedikit melibatkan kontak fisik;
3. Menggunakan peralatan (*equipment*) dan teknologi;
4. Memanfaatkan jaringan telematika (telekomunikasi, media dan informatika) global.¹²¹

¹²¹ Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *Ketika Kejahatan Berdaulat*, Peradaban, Jakarta, 2001, hlm. 45.

Memperhatikan rujukan lainnya, Ary Juliano Gema mengacu pada beberapa literatur serta praktik, menyebutkan *cybercrime* memiliki karakter yang khas dibandingkan kejahatan konvensional, yaitu antara lain:

1. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi di ruang/ wilayah maya (*cyberspace*), sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadapnya;
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang bisa terhubung dengan jaringan telekomunikasi dan/ atau internet;
3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materil maupun immateril (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional;
4. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya; dan
5. Perbuatan tersebut seringkali dilakukan secara transnasional/ melintasi batas negara.¹²²

Sebagaimana telah disebutkan eksese negatif yang diahirkan dari perkembangan bentuk-bentuk *cyber crime* ialah berkembangnya modus operandi dari kejahatan tradisional yang mempergunakan ruang virtual dalam melakukan kejahatan. Dalam fokus *cyber crime* pada penelitian ini terletak pada bentuk kejahatan tradisional yang memasuki ruang virtual dengan bantuan peralatan komputer dan teknologi internet. Tindak pidana yang difokuskan pada penelitian ini ialah perpaduan antara *cyber crime* dan delik politik. Salah satu kompleksitas perpaduan persoalan dari dua model kejahatan ini dapat dilihat dari contoh yang disampaikan Barda Nawawi Arief, yaitu:

¹²² Ary Juliano Gema, *Fenomena Cybercrime: Sebuah Fenomena di Dunia Maya*, www.fbi.go.id, diakses tanggal 05 Desember 2011.

Misalnya hukum Jerman melarang distribusi propaganda Neo-Nazi sedangkan di banyak negara lain tidak menyatakan perbuatan ini sebagai perbuatan illegal. Hal demikian menimbulkan masalah dalam penerapan, terlebih apabila pelakunya berada di negara lain yang tidak mengkriminalisasi perbuatan itu, dan aktivitasnya dilakukan di ruang maya (mayantara).¹²³

Persoalan tersebut tidak hanya erat dengan permasalahan yurisdiksi, akan tetapi juga dengan ancaman terhadap keamanan negara yang berkaitan dengan stabilitas atau kelangsungan berjalannya pemerintahan dan kedaulatan suatu negara. Hal yang sama juga dikhawatirkan, dimana lahirnya bentuk *cyber crime* yang memberikan serangan terhadap Pancasila dan terhadap persoalan yang telah nyata terjadi ini, negara dalam seolah-olah membiarkan perbuatan ini terus terjadi. Perpaduan antara dua tindak pidana yang memiliki beberapa karakteristik berbeda ini dapat disebutkan sebagai sebagai *cyber political crime*, yang lebih lanjut akan dijelaskan lebih rinci pada sub bab akhir bab ini.

C. Ideologi dan Posisi Ideologi Negara dalam Politik Hukum dan Pembangunan Nasional

Melakukan pendekatan secara holistik terhadap ideologi, sebenarnya bukanlah sesuatu yang mudah. Kerumitan memahami ideologi dikarenakan ideologi merupakan suatu bahasan yang sudah diperkenalkan semenjak perodesasi filsafat (barat) zaman kuno yang

¹²³ Barda Nawawi Arif, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, op.cit., hlm. 33.

dimulai oleh Plato.¹²⁴ Selain itu, memahami ideologi secara baik haruslah dilakukan secara komprehensif. Hal ini dikarenakan, ideologi sebagai suatu ilmu memasuki beragam khazanah ilmu pengetahuan, dari filsafat, negara, politik bahkan hingga linguistik.

Hanya saja, sebagaimana yang telah peneliti sebutkan pada kerangka pemikiran penelitian ini, maka konsepsi ideologi yang dipergunakan ialah pemaknaan ideologi secara melioratif yang diberikan Lorens Bagus dalam Kamus Filsafat-nya, dimana ideologi diartikan “setiap sistem gagasan yang mempelajari keyakinan-keyakinan dan hal-hal yang filosofis, ekonomis, politis dan sosial.”¹²⁵ Dengan konsepsi ideologi yang telah disebutkan pada bagian awal dalam penelitian, dirasakan masih sangat sederhana untuk mengantar pengkajian yang baik dalam memahami ideologi negara (Pancasila) sebagai objek kajian dalam penelitian yang hendak diproteksi. Oleh karena itu, peneliti dalam hal ini akan sedikit mengupas lebih dalam seluk beluk yang berkaitan dengan apa sebenarnya yang dimaksud dengan ideologi.

Menentukan pilihan terhadap pengertian terminologi ideologi sebenarnya mereduksi pengertian ideologi yang sangat luas dan beragam. Hal ini dikarenakan “tidak ada satu pun definisi ideologi yang dianggap baku.”¹²⁶ Oleh karena itu, tepatlah kiranya bila disebutkan

¹²⁴ Plato tidak secara tersurat bicara tentang ideologi. Meskipun demikian pemikirannya tentang *idea* yang erat kaitannya dengan pembebasan jiwa manusia bisa disetarakan dengan konsep ideologi dari beberapa tokoh sebelumnya. Lihat Bagus Takwin, *Akar-akar ideologi Pengantar “Kajian Konsep Ideologi dari Plato Hingga Bourdieu”*, Jalasutra, Yogyakarta, 2009, hlm. 22.

¹²⁵ Lorens Bagus, *op.cit.*, 2005, hlm. 306.

¹²⁶ Bagus Takwin, *op.cit.*, hlm. 2.

bahwa “membatasi pengertian ideologi pada satu defenisi yang tegas dan berlaku umum tidak dapat dilakukan tanpa mereduksi makna ideologi secara menyeluruh.”¹²⁷

Pereduksian pengertian ideologi pada penelitian ini dibatasi sekedar pada pengertian yang dibutuhkan. Oleh karena itu, peneliti beranggapan penting untuk menyebutkan beberapa pengertian ideologi secara umum yang mencakup pada pengertian ideologi sebagai kajian tentang ide atau gagasan sekaligus sebagai suatu keyakinan. Tujuan diuraikannya pemaknaan ideologi ini secara lebih dikarenakan ketika ada benturan yang dirasakan dapat merusak garis penelitian, maka defenisi-defenisi yang akan disebutkan ini nantinya dapat menjadi rujukan untuk menutupi kelemahan defenisi ideologi yang telah disebutkan. Adapun beberapa pengertian tersebut didasarkan pada rentetan sejarah dan perkembangan ideologi sebagai kajian ilmu.

Plato tidak pernah menggunakan atau menyebutkan istilah ideologi secara eksplisit, hanya saja pemikiran Plato merupakan salah satu gagasan yang kemudian hari diidentikkan dengan salah satu defenisi ideologi. Hal ini terlihat dari pendapat Bagus Takwin yang menganalogikan ajaran *idea* Plato dengan ideologi. Pandangan *idea* Plato ini didasarkan pada pemisahan dua realitas *psyche* dan *soma*.¹²⁸ Ide disebutkan Plato sebagai kebenaran hakiki, maka pengertian ideologi

¹²⁷ *Ibid.* Hlm. 3.

¹²⁸ Plato memandang realitas antara *psyche* (jiwa) dan *soma* (badan), dimana jiwa merupakan wujud yang sempurna dan tercemar ketika masuk ke dalam realitas badan.

adalah hukum tentang kebenaran sejati.¹²⁹ Kerumitan dalam ajaran Plato mengenai *idea* terletak pada pandangannya yang menggabungkan *psyche* dalam kehidupan. Hal ini terlihat dari pendapatnya sebagaimana dijelaskan oleh Alfatri Adlin, dimana “untuk mengetahui yang sejati diraih dengan kematian non biologis, yaitu *psyche* yang terlepas dari *soma*. Apabila tidak, maka kebijaksanaan hanya akan diperoleh setelah manusia mengalami kematian biologis, karena hanya pada saat itulah *psyche* bisa terpisah dari *soma*.”¹³⁰

Berbeda dengan gurunya, Aristoteles melihat realitas pada diri manusia pada suatu kesatuan antara jiwa dan badan. Sama dengan Plato, Aristoteles juga belum menggunakan istilah ideologi, hanya saja pandangan keduanya tetap dapat dilihat dalam gambaran ideologi sebagai ilmu tentang ide (*science of ideas*) seperti yang disebutkan de Tracy. Pemikiran Aristoteles selanjutnya ditekankan pada suatu proses pendapatan ide dilalui melalui proses inderawi yang dilanjutkan pada terbentuknya ide. Berangkat dari pemahaman yang diberikan Aristoteles, maka Bagus Takwin menyebutkan bahwa ideologi menurut Aristoteles ialah ilmu (dalam pengertian tertentu yang berarti aturan atau hukum) yang mengkaji bagaimana ide terbentuk dalam benak manusia.¹³¹

¹²⁹ Bagus Takwin, *op.cit.*, hlm.9

¹³⁰ Gilles Deleuze dan Felix Guattari, *What is Philosophy? Reinterpretasi Atas Filsafat, Sains dan Seni*, Jalasutra, Yogyakarta, 2010, hlm. vii. (diterjemahkan oleh Muh. Indra Purnama).

¹³¹ Bagus Takwin, *op.cit.*, hlm. 10.

Selanjutnya, ideologi tidak hanya dikenal sebagai *science of ideas* tetapi juga sebagai *belief system*. Hal ini dapat dilihat dari rumusan Ignas Kleden yang mendefinisikan ideologi sebagai:

seperangkat doktrin sistematis tentang hubungan manusia dengan dunia hidupnya, yang diajarkan dan disebarluaskan dengan penuh kesadaran, yang tidak hanya memberikan suatu kerangka pengetahuan yang bersifat netral, tetapi juga meminta sifat dan komitmen dari pihak yang menerimanya, dan sedikit banyak menimbulkan moral *passion* dalam diri penganutnya.¹³²

Penjelasan terhadap kedudukan ideologi sebagai *belief system* dapat diuraikan berangkat dari penjelasan Antonio Gramsci yang berkaitan dengan ideologi organis yang masih melihat ideologi bagian dari ide. Dalam hal ini, ideologi organis disebutkan sebagai “konsepsi tentang dunia yang secara implisit dimanifestasikan ke dalam kesenian, hukum, kegiatan ekonomi, dan semua manifestasi individual maupun kolektif”.¹³³

Berangkat dari penjelasan Gramsci ini, peneliti melihat sisi manifestasi suatu ideologi dalam wujud yang konkrit ini melahirkan praksis lain dari ideologi sebagai *belief system*. Dalam memanifestasikan ideologi sebagai ide tentunya ideologi tidak lagi hanya dilihat dalam sistem kognitif, melainkan juga sekaligus sistem normatif. Alisjahbana akhirnya melihat ideologi berupa “suatu sistem nilai, yang mungkin saja berdasar atau suatu *weltanschauung*”¹³⁴ (diartikan sebagai ‘keyakinan’). Keyakinan inilah yang mewujudkan manifestasi ide kepada praksis tertentu.

¹³² Slamet Sutrisno, *Filsafat dan Ideologi Pancasila*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006, hlm. 27.

¹³³ *Loc. cit.*

¹³⁴ *Loc. cit.*

Berdasarkan uraian di atas, secara sederhana ideologi yang dimaksud dalam penelitian ini melingkupi pemaknaan *science of idea* dan *belief system*. Makud dari ideologi dalam pengertian sebagai ide maupun keyakinan penelitian ini merupakan ideologi yag menaungi kehidupan bernegara, kelompok bahkan pribadi yang berkaitan erat dengan bidang politik. Dalam hal ini, ideologi politik yang dianut oleh suatu negara menentukan arah pembangunan nasional. Pembangunan nasional tersebut juga mencakup pembangunan hukum. Pengoperasian ideologi dalam pembangunan hukum merupakan perwujudan dari politik hukum. Posisi sedemikian jelas tidak melepaskan ciri penelitian hukum, dimana secara eksplisit diberikan porsi uraian mengenai perspektif hukum memandang ideologi. Pada bagian yang menguraikan kaitan antara hukum dan ideologi ini akan terlihat posisi penting ideologi menaungi kehidupan hukum dalam masyarakat.

Pada bagian akhir sub ini, peneliti menguraikan beberapa aliran ideologi besar dan Pancasila dalam posisinya sebagai ideologi politik yang dijadikan *leitstar* oleh suatu negara. Disediakkannya bagian khusus yang memberikan uraian beberapa ideologi tersebut tidak sekedar ditujukan untuk menunjang pemahaman mengenai kandungan ideologi tersebut, namun juga untuk melihat kontradiksi dan kesamaan nilai ideologi-ideologi dengan kandungan nilai Pancasila, sehingga dapat terlihat muatan nilai mana yang memberikan ancaman terhadap Pancasila.

1. Kaitan Politik dan Ideologi

Menurut Miriam Budiarjo, politik pada umumnya diartikan sebagai “usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga negara, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis.”¹³⁵ Sedangkan oleh, Lorens Bagus disebutkan beberapa pengertian politik, yang salah satunya ialah “aktivitas yang berkaitan dengan relasi antara bangsa-bangsa dan kelompok sosial lainnya, yang berhubungan dengan perkara penggunaan kekuasaan negara.”¹³⁶ Menurut hemat peneliti, kedua defenisi ini dapat membantu membuka jalan untuk memahami ideologi dalam perspektif politik.

Berangkat dari defenisi ideologi dan politik yang telah diuraikan di atas dapat disinkronisasikan defenisi ideologi politik, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu:

1. Suatu sistem kepercayaan yang menerangkan dan membenarkan suatu tatanan politik yang ada atau yang dicita-citakan dan memberikan strategi berupa prosedur, rancangan, instruksi serta program untuk mencapai tujuan.
2. Himpunan nilai, ide, norma, kepercayaan dan keyakinan (*weltanschauung*) yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang yang menjadi dasar dalam menentukan sikap terhadap kejadian dan problem politik yang dihadapinya dan yang menentukan tingkah laku politik.¹³⁷

Dari pengertian di atas dapat disebutkan politik menjadi alat untuk merealisasikan ide/ nilai/ konsep yang terkandung dalam suatu

¹³⁵ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 15.

¹³⁶ Lorens Bagus, *op.cit.*, hlm. 857.

¹³⁷ Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hal. 366.

ideologi. Secara eksplisit Arif Rohman menyebutkan, bahwa “ketika sebuah ideologi hendak diwujudkan, sebenarnya mengharuskan adanya kekuasaan politik yang memiliki kewenangan mengatur kehidupan tertentu dalam masyarakat.”¹³⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tinjauan terhadap politik terhadap ideologi diposisikan antara hubungan individu, kelompok, bangsa dengan pemegang kekuasaan. Dalam cakupan pengertian yang sederhana, pemegang kekuasaan ini dapat didentikkan sebagai Negara. Sebagai *science of ideas*, muatan-muatan ide/ gagasan/ konsep yang abstrak dalam anutan suatu ideologi menjadi arah dan panduan bagi negara untuk mengkokritkan ide tersebut melalui kekuasaan yang melekat pada ciri politik. Dalam kaitan ideologi sebagai *beliefs system*, ideologi tidak dilihat hanya sebagai ide/ gagasan/ konsep, melainkan juga sebagai wujud konstruksi berpikir yang dipegang teguh oleh otoritas pelaksana tugas negara dengan sokongan mayoritas rakyat. Hal ini dapat dihubungkan dengan fungsi legitimasi pada ideologi bersandar pada teori Max Webber mengenai Orde Sosial. Dalam tatanan ini disebutkan bahwa orde sosial melibatkan dua fenomena pokok yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, adanya klaim otoritas bagi lapisan elit pemimpin dan kedua, adanya kepercayaan atau kepatuhan mayoritas warga masyarakat. Di antara kedua fenomena orde sosial itu selalu terdapat ketidakcocokan tertentu, terdapat kesenjangan yang

¹³⁸ Arif Rohman, *Politik Ideologi Pendidikan*, LeksBang Mediatama, Yogyakarta, 2009, hlm. 6.

sifatnya laten. Fungsi ideologi adalah mengisi presisi tersebut dengan merekatkan diskrepansi yang ada, atau dengan perkataan lain melegitimasi otoritas.¹³⁹

Presisi yang diberikan ideologi menjadi dasar kestabilan berlangsungnya negara, dimana ideologi menjadi perekat perbedaan antara penguasa dan rakyatnya. Kondisi sebagaimana yang dimaksud tersebut tidak berlaku secara absolut, dimana terkadang golongan minoritas pada suatu negara tidak melihat ideologi anutan negara sebagai *beliefs system* yang juga terkonstruksikan padanya atau memiliki pandangan penafsiran berbeda mengenai ideologi yang dimaksud, sehingga kelompok minoritas mempunyai dasar legitimasi untuk merebut hak-haknya hilang melalui tindakan negara. Perbedaan yang ada tidak menutup kemungkinan terjadinya gesekan, dimana akan lahir represifitas negara terhadap rakyat (kelompok) yang memiliki perbedaan pandangan atau penafsiran dengannya, atau bisa saja ada perlawanan atau usaha dari kelompok tersebut untuk menggulingkan penguasa negara dan menjadikan ideologi yang diyakininya menjadi ideologi resmi negara. Di sinilah, kedudukan ideologi sebagai ide dan kepercayaan saling berkaitan erat, dimana keduanya menjadi satu praksis yang digerakkan dalam usaha untuk saling mendominasi dan memperjuangkan muatan nilai ideologi politik yang eksis.

¹³⁹ Slamet Sutrisno, *op.cit.*, hlm. 32.

Sistem politik haruslah dijalankan menurut ideologi anutan, dikarenakan ideologi yang dianut oleh masyarakat atau Negara merupakan ideologi yang dipakai untuk mewujudkan tatanan sistem politik yang lebih baik.¹⁴⁰ Pengaruh ideologi yang dianut merasuk pada seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi politik mendominasi corak berjalannya aspek ekonomi, hukum, pertahanan keamanan dan hubungan luar negeri negara. Hanya saja menjalankan politik berdasarkan ideologi anutan terkadang tidak mutlak melahirkan “buah” seperti tujuan yang termaktub dalam ideologi tersebut. Hal ini sepenuhnya bergantung pada kesadaran dan kemampuan otoritas yang berkuasa serta dukungan rakyat menghadapi tekanan ideologi lainnya, baik dari dalam maupun dari luar. Keadaan ini disebut sebagai konflik ideologi dan terjadi tidak hanya di Negara-negara dunia kedua dan ketiga karena tekanan Negara-negara maju. Konflik ideologi juga terjadi di Negara-negara maju.

Berdasarkan uraian di atas, maka diketahuilah bahwa ideologi politik yang dianut oleh suatu negara berperan menentukan arah pembangunan nasional. Hanya saja, keberhasilannya sepenuhnya ditentukan oleh konsistensi kelas berkuasa dan kontrol rakyat. Pembangunan nasional yang sesuai dengan ideologi yang dianut ditentukan kemampuan penguasa untuk menghegemonikan ideologi

¹⁴⁰ Arif Rohman, *op.cit.*, hlm. 22.

yang dianut atau dengan kata lain ideologi tersebut dapat diposisikan mendominasi ideologi lain yang masih eksis, sehingga hanya terdapat golongan kecil masyarakat yang menganut ideologi yang berbeda dengan yang ditentukan negara. Adapun kontrol rakyat difungsikan agar tidak ada penyelewengan terhadap cita-cita yang telah ditentukan ideologi negara.

2. Kaitan Hukum dan Ideologi

Berbicara mengenai kaitan antara hukum dan ideologi tidak terlepas dari dua topik mendasar, yaitu pengaruh ideologi terhadap hukum dan hukum sebagai alat melindungi ideologi (Negara). Selain dua topik tersebut, terdapat juga isu ikutan yang akan dijelaskan berdampingan dengan keduanya. **Pertama**, pengaruh ideologi terhadap hukum tidak terlepas dari hukum sebagai produk politik, dimana politik merupakan alat untuk mewujudkan muatan yang terkandung dalam ideologi.pernyataan. Hal ini dapat dirujuk pada pendapat Moh. Mahfud MD yang menyatakan:

“hukum adalah produk politik” adalah benar jika didasarkan pada *das sein* dengan mengkonsepkan hukum sebagai undang-undang. Dalam faktanya jika hukum dikonsepsikan sebagai undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif maka tak seorang pun dapat membantah bahwa hukum adalah produk politik sebab ia merupakan kristalisasi, formalisasi atau legalisasi dari kehendak-kehendak politik politik yang saling bersaing baik melalui kompromi politik maupun melalui dominasi oleh kekuatan politik yang terbesar.¹⁴¹

¹⁴¹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, op.cit., hlm. 5.

Dalam melihat hukum sebagai produk politik, politik berposisi sebagai alat untuk mengkonkritkan ide atau nilai pada suatu ideologi pada produk hukum (peraturan perundang-undangan). Sendi hukum yang bersumber dari ideologi Negara merupakan penopang dan pelindung serta menjadi arah dalam memudahkan konkretisasi ideologi dalam kehidupan bernegara. Hukum memberikan aturan-aturan dalam melindungi ekonomi, kehidupan bahkan juga politik.

Patut juga diketahui, proses politik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan juga dapat menghancurkan konten ide atau nilai dari suatu ideologi, sehingga hukum (peraturan perundang-undangan) jauh dari cerminan ideologi yang dianut Negara tersebut.

Selanjutnya, Satjipto Rahardo menyebutkan bahwa “ideologi sebagai paradigma tidak membiarkan hukum sebagai suatu lembaga yang netral.”¹⁴² Dalam penjelasan lebih lanjut yang diberikan Satjipto Rahardjo, secara tersirat dapat dipahami bahwa ideologi dapat memaksa dan mematahkan nilai-nilai universal kemanusiaan dan keadilan yang melekat pada hukum. Hal inilah yang harus diperhatikan dalam memahami ideologi sebagai keyakinan, dikarenakan ideologi berposisi layaknya sebagai agama yang memiliki kebenaran absolut bagi penganutnya.

¹⁴² Satjipto Rahardo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 78.

Kebebasan berideologi atau mempertahankan dan mengeluarkan pikiran memang mendapat perlindungan sebagai bagian dari kebebasan berpikir yang diakui melalui instrumen hukum internasional. Hanya saja, selayaknya hak-hak yang masuk dalam kategori hak paling dasar, maka hak asasi tersebut dibatasi oleh kewajiban asasi. Adapun instrumen hukum internasional yang mengatur hal tersebut ialah *Universal Declaration Of Human Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Rights*. Berkaitan dengan pembahasan lebih lanjutnya, akan dilakukan pada bab berikut penelitian ini.

Kedua, kaitan hukum dan ideologi ialah hukum menjadi alat untuk melindungi ideologi. Secara nyata hal ini masih memiliki keterkaitan dengan politik yang menjadi sarana otoritas pembentukan hukum (peraturan perundang-undangan), hanya saja memiliki tujuan yang lebih khusus, yaitu sebagai sarana proteksi terhadap konten ide maupun nilai pada ideologi tersebut. Aroma politik dalam kaitan kedua ini dilihat dari undang-undang yang dibuat, apakah peraturan tersebut secara nyata dan sungguh ditujukan untuk melindungi ideologi sebagai *leitstar* bagi Negara atau sekedar sebagai sarana untuk menuruskan kekuasaan yang diktator.

Ideologi yang dilindungi dalam hal ini merupakan ideologi politik yang diakui secara sah oleh pemegang otoritas Negara. Memberikan perlindungan kepada ideologi melalui hukum dilakukan dengan cara

memposisikan ideologi sebagai kebendaan hukum (*rechtsgoederen*) atau kepentingan hukum. Berhubungan dengan eksistensi kebendaan hukum yang diberikan perlindungan melalui hukum pidana, Jan Remmelink menyebutkan sebagai berikut:

Dalam dogmatika ilmu hukum kita berbicara tentang kebendaan hukum atau kepentingan hukum. Maksudnya adalah nilai-nilai, yang oleh pembuat undang-undang hendak dilindungi, baik terhadap pelanggaran maupun ancaman bahaya (risiko), dengan cara merumuskan suatu ketentuan pidana.¹⁴³

Selanjutnya, Remmelink juga menyebutkan beberapa cakupan beberapa kebendaan hukum yang dilindungi, yaitu “hidup, kekayaan, ketertiban umum, integritas para pejabat pemerintah, dan perlindungan atas rahasia Negara.”¹⁴⁴ Dalam kesempatan tersebut, Remmelink memang tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai kebendaan hukum yang berkaitan dengan keamanan Negara. Hanya saja, menurut hemat peneliti, bahwa perlindungan terhadap ideologi (politik) Negara masuk ke dalam cakupan kejahatan terhadap keamanan Negara.

Sebagaimana diketahui, hukum pidana dalam memberikan perlindungan menggunakan nestapa walaupun terdapat orientasi kemanusiaan di dalamnya, namun iklim represif tetap melekat pada hukum pidana memberikan perlindungan terhadap kebendaan hukum. Berkaitan dengan perlindungan terhadap ideologi Negara sebagai

¹⁴³ Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 12-13.

¹⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 13.

salah satu kepentingan hukum yang sangat urgen posisinya, tentunya dalam pelaksanaannya melahirkan bentrokan sesama kepentingan hukum lainnya. Dalam kesempatan ini, peneliti juga menyandarkan argumen ini pada pendapat Remmelink lainnya, yaitu:

Seperti semua kebendaan yang kita temukan dalam masyarakat, semua kebendaan atau kepentingan hukum itu tentunya dapat dipertanyakan, terbuka terhadap pelbagai risiko dan juga dapat dikorbankan demi kepentingan-kepentingan lain yang lebih tinggi atau bernilai. Hanya saja kepentingan atau kebendaan hukum ini tidak boleh dikorbankan dengan cara-cara tertentu yang oleh masyarakat dianggap dipandang tercela dan karena itu dikualifikasi sebagai tindak pidana.¹⁴⁵

Menyangkut pernyataan Remmelink, peneliti mengkorelasikannya dengan perlindungan terhadap ideologi Negara, dimana perlindungan kepentingan hukum ini memiliki kemungkinan yang sangat besar mengusik kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu, hukum pidana harus dijalankan sesuai konsep hak asasi manusia dan tidak boleh secara absolut tunduk pada kehendak politik penguasa, dalam kata lain, walaupun hukum pidana dijalankan tetap berlangsung sehumanis mungkin. Berdasarkan sejarah, dapat ditemui beberapa kasus yang memperlihatkan dominasi perlindungan terhadap ideologi Negara yang mengkebiri kepentingan hukum warga Negara secara “membabi buta”, sehingga tercatat sebagai sejarah buruk yang melahirkan kejahatan terhadap kemanusiaan yang serius. Khusus di Indonesia, sejarah ini pernah terjadi pada saat pemerintahan orde baru, dimana Pancasila diselewengkan dari

¹⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 13-14.

khithnya dan dijadikan dasar represif. Setiap tindakan rakyat yang bertentangan dengan kehendak dan kemauan Soeharto disebutkan sebagai gerakan kontra Pancasila dan harus segera “dibersihkan”.

Sebagai refleksi lainnya untuk melihat kaitan antara ideologi dan hukum, khususnya hukum pidana, dapat dilihat dari pendapat Sudarto di bawah ini:

Pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik dari sesuatu bangsa dimana hukum itu berkembang dan merupakan hal yang sangat penting bahwa seluruh bangunan hukum itu bertumpu pada pandangan politik yang sehat dan konsisten. Dapat diperhitungkan, bahwa KUHP dari negara-negara Eropa barat yang bersifat individualistik-kapitalistik bercorak lain dari KUHP dari negara-negara Eropa Timur yang berpandangan politik sosialis. Di negara kita pandangan politik itu berdasarkan Pancasila, sedangkan pandangan tentang hukum pidana erat sekali hubungannya dengan pandangan yang umum, tentang negara dan masyarakat dan tentang kriminalitas (kejahatan).

Berdasarkan pendapat Sudarto di atas, wajar kiranya penegakan hukum pidana di Indonesia sangat sulit dijalankan secara sehat dan konsisten berdasarkan Pancasila. Hal ini tentu tidak terlepas dari alasan bahwa KUHP yang kita gunakan saat jelas tidak bercorak Pancasila sebagai ideologi politik Indonesia. Kondisi ini jelas melahirkan benturan-benturan pengadopsian nilai Pancasila dalam menjalankan hukum pidana materil yang bersifat individualistik-kapitalistik sebagaimana anutan ideologi liberalisme pada umumnya. Oleh karena itu, sudah sepantasnyalah hukum pidana

3. Beberapa Ideologi Besar dan Pancasila

Mengkotak-kotakkan ideologi dalam beberapa kelompok, secara jelas merupakan mereduksi pemaknaan terhadap ideologi. Hanya saja hal ini merupakan suatu keharusan untuk melihat beragam paham atau aliran ideologi (politik) yang dianut oleh Negara-negara di dunia. Ideologi dalam hal ini tetap berpijak sebagai *science of idea* dan *beliefs system*.

Dalam realitanya, terdapat banyak aliran ideologi yang mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hanya saja dalam praktiknya, terkadang tidak terdapat pengakuan secara eksplisit yang mendeklarasikan bahwa Negara tersebut menganut paham tersebut, namun dalam praktiknya terlihat jelas corak satu ideologi secara dominan mewarnai kehidupan negara tersebut.

Mengingat keberagaman ideologi yang berjumlah sangat banyak, maka hanya diuraikan secara ringkas beberapa ideologi yang peneliti anggap merupakan ideologi besar dikarenakan secara dominan dianut oleh Negara-negara di dunia. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia juga diuraikan secara ringkas. Pentingnya uraian ini, untuk memperlihatkan ketegasan posisi Pancasila sebagai ideologi dan muatan nilai ideologi mana yang tidak sesuai dengan Pancasila.

a. Liberalisme

Kebebasan merupakan hal pokok yang diusung oleh ideologi ini, manusia memiliki kesempatan yang sama dalam kehidupan dan kebebasan dilaksanakan dengan tanggungjawab. Secara filsafati, liberalisme merupakan sintesa dari beberapa aliran, yaitu materialisme, rasionalisme dan individualism.¹⁴⁶

Menurut Arif Rohman ciri-ciri ideologi liberalisme secara konkrit adalah:

- (a) Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang lebih baik.
- (b) Setiap masyarakat mempunyai kebebasan intelektual penuh, termasuk kebebasan dalam berbicara, beragama, serta kebebasan pers
- (c) Pemerintah hanya mengatur kehidupan masyarakat secara terbatas.
- (d) Kekuasaan dari seseorang terhadap orang lain merupakan hal yang buruk. Oleh karenanya, kekuasaan harus dicurigai, dibatasi, dan diawasi karena cenderung disalahgunakan. Sehingga, pemerintah harus dijalankan sedemikian rupa dan penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah.
- (e) Manusia dikatakan bahagia manakala individu-individu di dalamnya bahagia.¹⁴⁷

Tiga hal yang mendasar dari Ideologi Liberalisme yakni kehidupan, kebebasan dan hak milik (*life, liberty and property*). Tiga nilai ini yang menumbuhkan suburkan sistem ekonomi kapitalisme pada ideologi liberalisme.¹⁴⁸ Liberalisme-individualisme dianggap sebagai jangkar dari kapitalisme yang pada perkembangannya mendorong

¹⁴⁶ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigman, Yogyakarta, 2010, hlm. 143.

¹⁴⁷ Arif Rohman, *op.cit.*, hlm. 34-35.

¹⁴⁸ Anonim, *Liberalisme*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Liberalisme>, diakses tanggal 26 November 2011.

kolonialisme-imperialisme.¹⁴⁹ Selain itu, liberalisme merupakan akar lahirnya neoliberalisme dimana “kebebasan individu yang dikaitkan dengan terjadinya pasar bebas di dunia internasional. Di dalam ideologi ini tercipta kekuatan ekonomi yang menjadi tolok ukur kekuatan politik.”¹⁵⁰

b. Konservatisme

Pokok ajaran ini ialah mengajarkan hal-hal yang sudah menjadi kelaziman. Ada pendapat yang menyatakan konservatisme pada dasarnya merupakan filsafat politik. Adapun gejala yang menandai konservatisme, yaitu:

- (a) Masyarakat yang terbaik adalah masyarakat yang didalamnya terdapat ketentraman sosial (*social order*) dan tertata baik. Di dalamnya terdapat aturan yang jelas bagaimana caranya seseorang harus berhubungan dengan sesamanya. Sehingga seseorang akan memperoleh kebahagiaan sebagai anggota keluarga dan anggota masyarakat, dari pada hanya sebagai individu.
- (b) Untuk menjadikan masyarakat yang stabil dan tertata diperlukan suatu pemerintahan yang memiliki kekuatan yang mengikat dan bertanggungjawab.
- (c) Pemerintah bertanggungjawab terhadap individu yang lemah, bukan pada individu itu sendiri yang harus mencukupi hidupnya. Pemerintah berkewajiban memberikan jaminan kesejahteraan sosial bagi yang berpenghasilan rendah. Dengan kata lain, pemerintah harus bisa mewujudkan dirinya menjadi Negara kesejahteraan (*welfare state*).¹⁵¹

Ciri yang melekat pada konservatisme ini ialah adanya budaya atau nilai agama yang melekat pada suatu sistem kekuasaan. Hal ini

¹⁴⁹ Yudi Latif, *op.cit.*, hlm. 16. (Dapat dilihat pada catatan kaki nomor 10).

¹⁵⁰ Anonim, *Macam-Macam Ideologi Negara*, <http://www.adipedia.com/2011/04/macam-macam-bentuk-ideologi-negara.html>, diakses tanggal 11 November 2011.

¹⁵¹ Arif Rohman, *op.cit.*, hlm35-36.

merupakan dasar peneliti yang beranggapan agama bukan bagian dari salah satu ideologi.

c. Sosialisme dan Komunisme

Pada awalnya “sosialisme” dan “komunisme”¹⁵² disamakan pengertiannya, hanya saja belakangan komunisme digambarkan sebagai aliran sosialis yang lebih radikal, yang menuntut penghapusan total hak milik pribadi dan kesamaan konsumsi serta mengharapkan keadaan komunis itu bukan dari kebaikan pemerintah, melainkan semata-mata dari perjuangan kaum terhisap.¹⁵³ Apabila diruntut berdasarkan teori dialektika historis, sosialisme merupakan bentuk negasi sebelum terbentuknya negara komunis. Rentetan dialektika tersebut, **komunal primitif—feodalisme—borjuasi—kapitalisme—sosialisme—komunal modern.**

Sebagai ideologi, sosialisme sebenarnya lebih dahulu dikenal dibandingkan komunisme, khususnya mengenai penciptaan komunisme sebagai ideologi negara yang dicetuskan Lenin pada abad ke-duapuluh. Berikut dijelaskan secara terpisah mengenai sosialisme dan komunisme secara singkat yang selanjutnya akan diuraikan perbedaan antara keduanya.

¹⁵² Ada yang menyebutkan istilah sosialisme dan komunisme lahir seiring pada tahun 1830 di Prancis,, namun di sumber lainnya disebutkan bahwa sosialisme lebih dulu lahir pada tahun 1827 oleh golongan sosialis penganut Saint-Simonisme.

¹⁵³ Frans Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 19.

Pertama, sosialisme. Dalam hal peneliti tegaskan, bahwa sosialisme yang disampaikan Marx bukanlah ideologi negara komunisme yang disampaikan Lennin, hanya saja tidak dapat dipungkiri bahwa teori-teori dipergunakan Lennin banyak berasal dari ajaran sosialisme yang dicetuskan Marx secara pribadi maupun secara bersama Friedrich Engels. Walaupun dalam peristilahan Marx mempergunakan istilah komunisme, namun hal ini merupakan sebuah bentuk praksis yang masih didominasi permasalahan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, sosialisme merupakan pertentangan terhadap sistem ekonomi kapitalisme yang dilahirkan oleh ideologi liberalisme. Sebelum Marx, terdapat beberapa ajaran sosialisme yang dipelopori oleh Babeuuef, Saint-Simon, Owen, Fourier, Cabet, Blanqui, Weitling, Prodhon, Blanc dan Hess. Tokoh-tokoh yang disebutkan sebagai tokoh sosialisme purba. Hanya saja, pemikiran-pemikiran mereka tidak dapat dilepaskan dari lahirnya “sosialisme ilmiah” yang dicetuskan Marx.

Beberapa pemikiran sosialisme yang cukup mencerminkan kandungan nilai sosialisme yang dikembangkan oleh Marx, seperti Saint-Simon yang menyatakan negaralah yang menata masyarakat, negara bertugas untuk mengurus agar bidang produksi berfungsi dengan baik.¹⁵⁴ Humanisme kandungan sosialisme dapat dilihat dari Owen yang menyatakan, upah dan kondisi kerja yang baik tidak

¹⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 23.

mesti merugikan perusahaan.¹⁵⁵ Dalam prinsipnya, sosialisme menganut adagium, “tiap orang mendapatkan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya”. Hanya saja dalam sosialisme tidak ditemukan kesamaan pendapat mengenai penguasaan alat produksi, apakah kepemilikan terhadap alat produksi harus dihapus atau sekedar ditata dengan baik.

Kedua, komunisme. Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa Marxisme merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari komunisme (Lenninisme-Marxisme). Ciri-ciri inti dari masyarakat komunis adalah penghapusan hak milik pribadi atas alat-alat produksi, penghapusan adanya kelas-kelas sosial, menghilangnya negara, penghapusan pembagian kerja.¹⁵⁶ Selanjutnya, dalam masa transisi, maka negara dikuasai oleh satu partai, yaitu Partai Komunis melalui diktatur proletariat. Keberadaan negara perlahan-lahan dihilangkan secara sepenuhnya ketika kapitalisme di seluruh dunia telah runtuh. Selain itu, dalam komunisme dimungkinkan lahirnya revolusi bersenjata.

Pada praktiknya, diktatur proletariat dalam negara komunisme, cenderung melahirkan sistem politik yang melahirkan kelas baru. Dimana disebutkan *wisegEEK.com*, *communism as practiced by Lenin, Stalin and Chairman Mao is an entirely different proposition. This kind of communism sets up an authoritarian*

¹⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 26.

¹⁵⁶ *Ibid.*, 171.

*government, with the best goods and services going to those in government.*¹⁵⁷

Mengenai perbedaan mendasar antara sosialisme dan komunisme dapat dilihat dari pendapat Arif Rohman, yaitu:

Sosialisme menghendaki perubahan secara damai dan bertahap serta demokratis, tetapi komunisme justru menghendaki dengan cara revolusi. Dalam pandangan komunisme, kapitalisme tidak bisa diganti dengan sosialisme manakala tidak dilakukan dengan cara paksa melalui gerakan buruh (proletar).¹⁵⁸

Sebagai penutup, berikut disebutkan perbedaan komunisme dan sosialisme beserta persamaan mendasarnya, yaitu:

One point that is frequently raised to distinguish socialism from communism is that socialism generally refers to an economic system, while communism generally refers to both an economic and a political system. As an economic system, socialism seeks to manage the economy through deliberate and collective social control. Communism, however, seeks to manage both the economy and the society by ensuring that property is owned collectively, and that control over the distribution of property is centralized in order to achieve both classlessness and statelessness. Both socialism and communism are similar in that they seek to prevent the ill effects that are sometimes produced by capitalism.¹⁵⁹

d. Pancasila

Sebelum berbicara panjang lebar mengenai Pancasila, peneliti akan memulainya dengan menyebutkan lima sila dalam Pancasila, yaitu:

¹⁵⁷ What is communism?, <http://www.wisegeek.com/what-is-communism.htm>, diakses tanggal 13 Desember 2011.

¹⁵⁸ Arif Rohman, *op.cit.*, hlm. 37.

¹⁵⁹ What is the difference between socialism and communism, <http://www.wisegeek.com/what-is-the-difference-between-socialism-and-communism.htm>, diakses tanggal 13 Desember 2011.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin dalam hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ Perwakian
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lahirnya Pancasila tidak terlepas dari sejarah panjang Negara Indonesia, dimulai dari masa perjuangan pra-kemerdekaan hingga Pancasila disahkan oleh PPKI sebagai dasar negara pada sidang pertamanya ditanggal 18 Agustus 1945. Tidak dapat dipungkiri proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara mengalami perdebatan yang hebat, namun dengan pertimbangan demi lahirnya Negara Indonesia yang utuh, maka kesediaan golongan tertentu mengenyampingkan egonya sangat patut diacungi jempol.

Membahas sejarah kelahiran Pancasila sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari piagam Jakarta, yang merupakan cikal bakal lahirnya Pancasila. Poin utama yang menjadi perdebatan pada Piagam Jakarta ialah terdapatnya pengeklusifan golongan agama tertentu.¹⁶⁰ Hilangnya tujuh kata yang dianggap menimbulkan kontroversial pada Piagam Jakarta dapat dikatakan merupakan kedewasaan sikap para pendiri bangsa. Selain itu, hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran besar Bung Hatta dalam melakukan pendekatan terhadap golongan Islam. Suatu ucapan Bung Hatta yang sangat fonumenal dalam menyelesaikan persoalan

¹⁶⁰ Pengeklusifan ini tidak dapat dilihat secara sempit, untuk melihat adanya poin pertama Piagam Jakarta, "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" harus direntetkan secara rapi berdasarkan sejarah, dimana posisi golongan Islam yang terpinggirkan pada masa penjajahan.

perbedaan pendapat antara golongan kebangsaan dan golongan Islam ini ialah:

Pada waktu kami menginsyafi, bahwa semangat Piagam Jakarta tidak lenyap dengan menghilangkan perkataan “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dan menggantinya dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁶¹

Demikianlah sejarah singkat mengenai kelahiran Pancasila.

Selanjutnya, akan diuraikan mengenai Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia, sekaligus ide dan nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila secara ringkas. Sesungguhnya tidaklah mudah untuk menguraikan Pancasila secara ringkas, oleh karena itu diharapkan bagi yang hendak menggali Pancasila secara komprehensif dapat menggali hal ini melalui sumber rujukan lain.

Pancasila merupakan ideologi nasional Indonesia yang menjadi dasar pemersatu bangsa dengan keanekaragaman perbedaan yang melekat pada negara ini. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Arif Rohman, yaitu:

Pancasila sebagai ideologi nasional Indonesia merupakan seperangkat nilai dasar yang telah disepakati bersama antar kelompok masyarakat dengan semboyan “Bhineka Tunggal Ika” yang artinya meskipun berbeda namun tetap satu (*unity in diversity*). Dengan semboyan ini diharapkan perbedaan antar kelompok suku, etnis, adat istiadat, bahasa, dan agama di Indonesia tidak mendatangkan bencana akan tetapi justru mendatangkan keuntungan.¹⁶²

¹⁶¹ Yudi Latif, *op.cit.* hlm. 37.

¹⁶² Arif Rohman, *op.cit.*, hlm. 42.

Pancasila memang berasal dari galian-galian nilai lokal, namun menurut peneliti, Pancasila juga memberikan cerminan dari beberapa ideologi terdahulu yang lahir sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari uraian ringkas mengenai muatan nilai dalam masing-masing sila pada Pancasila.

Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila kandungan sila ini merupakan perwujudan pernyataan bahwa “negara yang didirikan adalah pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa.”¹⁶³ Dalam proses pembentukan Pancasila, Soekarno menegaskan bahwa prinsip ketuhanan merupakan:

Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendak ber-Tuhan. Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al-Masih, yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad S.A.W., orang Budha menjalankan ibadahnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi, marilah kita semua ber-Tuhan. Hendaknya negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara leluasa. Segenap rakyat hendak ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada “egoisme-agama”. Dan, hendaknya Negara Indonesia satu negara yang bertuhan!¹⁶⁴

Dalam hal ini, jelas Pancasila mengarahkan Indonesia terbentuk bukan sebagai negara sekuler, melainkan negara yang dijalankan menurut tuntunan ketuhanan. Bila dirunut ke dalam aliran ideologi lain, menurut peneliti sila pertama memiliki nuansa konservatif, hanya saja tidak konservatif radikal yang melulu

¹⁶³ Kaelan, *op.cit.*, hlm. 79.

¹⁶⁴ Yudi latif, *op.cit.*, hlm. 75.

mengacu pada satu ajaran agama saja. Bahkan dari pendapat Bung Karno jelas, sila pertama diadakan penuh dengan toleransi antar umat (dapat disebut golongan) beragama. Selain itu, sila pertama merupakan filosofi payung yang menjadi jiwa terhadap sila-sila lainnya ketika melihat Pancasila dalam sistem hierarkis.

Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang dikandung oleh sila ini mencegah ego kebangsaan yang buruk untuk Indonesia merdeka. Dalam hal Bung Karno mengutip pernyataan Mahatma Gandhi, yaitu “saya seorang nasionalis, tetapi kebangsaan saya perikemanusiaan, *my nationalism is my humanity*”. Menurut peneliti, selain mengacu pada pandangan *swadeshi* Gandhi, sila ini juga memuat muatan nilai *humanistic* yang terkandung dalam perlindungan individu dalam liberalisme dan perlindungan komunal dalam sosialisme.¹⁶⁵

Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ini merupakan pengikat kesatuan wilayah Indonesia yang memiliki kultur, agama, ras serta struktur geopolitik yang berbeda. Adanya sila ini meruntuhkan keegoan golongan maupun lainnya. Apapun alasannya, persatuan nasional menjadi nilai terdepan dalam membentuk dan mempertahankan Indonesia sebagai suatu negara.

Sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin dalam hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ Perwakilan. Muatan sila ini

¹⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 180.

merupakan implementasi ide demokrasi.¹⁶⁶ Demokrasi yang dianut Indonesia tidaklah sama dengan demokrasi yang dianut oleh negara-negara barat maupun Eropa Timur dengan kecenderungan sosialismenya. Soekarno menyatakan, “demokrasi kita adalah demokrasi yang disebutkan sebagai sila keempat itu adalah demokrasi yang membawa corak kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Tidak perlu “identik” artinya sama dengan demokrasi yang dijalankan oleh bangsa-bangsa lain”.¹⁶⁷ Menurut Yudi Latif, demokrasi Indonesia itu hendaknya mengandung ciri: (1) kerakyatan (daulat rakyat), dan (2) permusyawaratan (kekeluargaan).¹⁶⁸

Sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Banyak yang menyebutkan sila ini merupakan perwujudan ideologi sosialisme, namun perlu ditegaskan sosialisme yang dimaksud ini ialah sosialisme yang berbeda, yaitu “sosialisme ala indonesia”¹⁶⁹. Dalam menerjemahkan sila terakhir ini, Hatta yang juga menganut sosialisme yang cenderung lebih ke kanan memberikan penegasan “usaha memperjuangkan keadilan dan kemakmuran, dalam

¹⁶⁶ Terdapat beberapa sumber yang menyebutkan bahwa demokrasi merupakan bagian dari ideologi. Sebagai bagian dari ideologi, demokrasi dipandang merupakan cerminan penguasaan sentral rakyat dalam negara. Miriam Budiarto melihat demokrasi secara garis besar dibagi menjadi dua, yang dilaksanakan secara konstitusional dan demokrasi yang dilingkupi komunisme. Menurut penulis, demokrasi tidak dapat dipandang secara penuh sebagai ideologi dikarenakan pelaksanaan demokrasi pada umumnya dipengaruhi oleh ideologi politik yang dianut oleh suatu negara tertentu.

¹⁶⁷ Yudi Latif, *op.cit.*, hlm. 476.

¹⁶⁸ *Loc.cit.*

¹⁶⁹ Soekarno menyebutkan sosialisme ala Indonesia dengan istilah “marhaenisme”. Marhaenisme sebagai asas dan perjuangan sosialisme ala Indonesia berlandaskan prinsip “sosio nasionalisme” dan “sosio demokrasi” yang mengehendaki “hilangnya tiap-tiap kapitalisme, imperialisme, dan kolonialisme.

pandangan Bung Hatta, meniscayakan adanya semangat kerja sama, tolong-menolong sesama rakyat Indonesia dalam suasana kederajaan.¹⁷⁰

Selanjutnya, walaupun Pancasila juga mengadopsi nilai ataupun ide dari ideologi lainnya, Jimly Asshidiqie menegaskan secara implisit bahwa Pancasila memiliki corak khas yang berbeda, yaitu:

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki perbedaan dengan sistem kapitalisme-liberal maupun sosialisme-komunis. Pancasila mengakui dan melindungi baik hak-hak individu maupun hak masyarakat baik di bidang ekonomi maupun politik. Dengan demikian ideologi kita mengakui secara selaras baik kolektivisme maupun individualisme. Demokrasi yang dikembangkan, bukan demokrasi politik semata seperti dalam ideologi liberal-kapitalis, tetapi juga demokrasi ekonomi. Dalam sistem kapitalisme liberal dasar perekonomian bukan usaha bersama dan kekeluargaan, namun kebebasan individual untuk berusaha. Sedangkan dalam sistem etatisme, negara yang mendominasi perekonomian, bukan warga negara baik sebagai individu maupun bersama-sama dengan warga negara lainnya.¹⁷¹

Sebagai catatan penutup, istilah Pancasila memang pertama kali diuraikan secara rinci oleh Soekarno pada 1 Juni 1945, hanya saja dari muatan ide atau nilai pada kelima sila tersebut, beliau enggan disebut sebagai pencipta Pancasila. Hal ini terurai dari salah satu pernyataannya, yaitu:

Kenapa diucapkan terima-kasih kepada saya, kenapa saya diagung-agungkan, padahal toh sudah sering saya katakan,

¹⁷⁰ Yudi Latif, *op.cit.*, hlm. 523.

¹⁷¹ Jimly Asshiddiqie, *Ideologi, Pancasila dan Konstitusi*, hlm. 8, makalah dalam. Lihat juga Jimly Asshiddiqie, "Negara Hukum, Demokrasi, dan Dunia Usaha", makalah disampaikan dalam Orasi Ilmiah Wisuda XX Universitas Sahid, Jakarta 20 September 2005.

bahwa saya bukan pencipta Pancasila. Saya sekedar penggali Pancasila daripada bumi tanah air Indonesia ini, yang kemudian lima mutiara yang saya gali itu, saya persembahkan kembali kepada bangsa Indonesia. Malah pernah saya katakan, bahwa sebenarnya hasil, atau lebih tegas penggalian dari pada Panca Sila ini, saudara-saudara, adalah pemberian Tuhan kepada saya.¹⁷²

D. Kejahatan Terhadap Pancasila Melalui Teknologi Internet Sebagai Kejahatan Politik dan *Cyber Crime*

Merumuskan pemahaman yang mendalam mengenai kejahatan politik, berhubungan dengan dua hal, yaitu dari tindak pidana yang dilakukan dan dari unsur subjektif dari si penjahat. Sebagaimana telah peneliti sebutkan pada bagian sub kerangka pemikiran pada bab I, batasan kejahatan politik dalam penelitian ini diselaraskan pada teori perbuatan pidananya dan sifat subjektif si pelaku. Pertama, dalam melihat apakah suatu perbuatan merupakan suatu delik politik Hazewinkel Soeringa mengutarakan empat empat teori, yaitu:

- a. Teori objektif atau disebut juga teori absolut
Teori mengemukakan bahwa delik politik ditujukan terhadap negara dan berfungsinya lembaga-lembaga negara.
- b. Teori subjektif atau teori relatif
Pada azasnya semua delik umum yang dilakukan dengan suatu tujuan. Latar belakang serta tujuan politik, merupakan suatu delik politik.
- c. Teori "Predominan"
Teori ini membatasi pengertian yang luas dari delik politik terutama terhadap teori subjektif atau teori relatif. Dalam hal ini diperhatikan apa yang "dominan" dari suatu perbuatan. Apabila yang dominan merupakan suatu kejahatan umum, maka perbuatan tersebut tidak disebutkan sebagai delik politik.

¹⁷² Yudi Latif, *op.cit.*, hlm. 20-21.

d. Teori “political Incidence”

Teori ini melihat perbuatan yang dianggap sebagai bagian dari suatu kegiatan politik

Berdasarkan penegasan pada kerangka pemikiran yang telah peneliti uraikan, maka teori predominan merupakan teori yang dipergunakan dalam menentukan suatu delik dapat dimasukkan sebagai delik politik. Pembatasan mengenai apa yang dimaksud dengan delik politik merupakan usaha yang tidak mudah dikarenakan terminologi ini bukan merupakan terminologi yuridis. Oleh karena itu, menurut peneliti delik politik menurut teori predominan mencakup pada perbuatan yang terkategori tindak pidana biasa namun unsur perbuatannya kental nuansa politis yang membahayakan atau merugikan alat kelengkapan negara maupun warga negaranya, seperti pencurian logistik PEMILU.

Berdasarkan hal tersebut, maka menurut hemat peneliti teori predominan tidak dapat mutlak dipergunakan secara mandiri dan harus didukung oleh unsur subjektif pada pelaku delik politik. Pentingnya unsur subjektif ini tidak hanya dipergunakan sebagai syarat mutlak yang harus ada dalam pemidanaan, melainkan juga untuk mengklasifikasikan delik yang dilakukan si pelaku apakah masuk dalam kategori delik biasa atau mutlak merupakan delik politik. Pentingnya penentuan suatu perbuatan tersebut merupakan delik politik atau tidak memang diakui tetap berkorelasi erat dengan pemidanaan, bahkan lebih lanjut akan ditemukan hubungan erat berkaitan dengan jenis pidana atau tindakan yang dijatuhkan. Hanya saja hal ini terlalu dini dibahas pada bab ini.

Berbicara mengenai syarat pemidanaan, A.Z. Abidin menjelaskan tentang syarat pemidanaan yang dibagi dua, yaitu:

- a. *Actus reus (delictum)* – perbuatan kriminal sebagai syarat pemidanaan *objektif*.
- b. *Mens rea* – pertanggungjawaban kriminal sebagai syarat pemidanaan *subjektif*.

A ditambah B = C (syarat pemidanaan)¹⁷³

Skema syarat pemidanaan di atas, disebutkan oleh Barda Nawawi Arief formula/ model/ pola konvensional.¹⁷⁴ Lebih lanjut, dijelaskannya bahwa:

adanya pidana, tidak hanya didasarkan pada adanya “tindak pidana” (TP) dan “kesalahan atau pertanggungjawaban pidana” (K/PJP), tetapi juga didasarkan pada “tujuan pemidanaan”. Persyaratan pemidanaan demikian dapat diskemakan sebagai berikut:

$$\text{PIDANA} = \text{TP} + \text{K (PJP)} + \text{Tujuan}$$

Mengaitkan tujuan pemidanaan dengan delik politik, tentu berkaitan dengan pidana yang hendak atau yang dapat dijatuhkan pada pelaku. Kaitan tujuan pidana dengan delik politik dapat diacukan pada pendapat Bassioni. Menurut Bassioni sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan tersebut menurut Bassioni ialah:¹⁷⁵

1. Pemeliharaan tertib masyarakat;

¹⁷³ Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm. 90.

¹⁷⁴ Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Perspektif Pembaharuan & Perbandingan Hukum Pidana*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm. 13.

¹⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 12.

¹⁷⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, *op.cit.*, hlm. 36.

2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
3. Memasyarakatkan kembali (*resosialisasi*) para pelanggar hukum;
4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Kedua, pentingnya memperhatikan unsur subjektif dalam delik politik ini dapat dilihat dari pernyataan Remmelink mengenai motif *altruistic* berdasarkan keyakinan dari si pelaku. Remmelink menggolongkan para pelaku kejahatan politik dengan “pelaku berdasarkan keyakinan”, yaitu orang-orang dengan sadar menentang tertib hukum yang berlaku karena pendapat-pendapat tentang negara atau hukum yang mereka anut mereka anggap lebih luhur daripada pendapat-pendapat yang dijunjung oleh negara yang bersangkutan.¹⁷⁷

Berkaitan dengan kejahatan yang berdasarkan keyakinan ini, Stephen Schafer mempunyai pandangan yang tidak jauh berbeda dengan pendapat Remmelink. Dalam hal ini Schafer menyebutkan “*the political criminal “convicted” about truth and justification his own beliefs, which, in their ultimate analysis, are the products of defective perception of the moral commands of the sovereigns power*”.¹⁷⁸ Selanjutnya, disebutkan juga bahwa pelaku delik politik mempunyai semangat (berkaitan dengan keyakinannya) untuk mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi

¹⁷⁷ Jan Remmelink, *op.cit.* hlm. 73.

¹⁷⁸ Stephen Schafer, *The Political Criminal The Problem of Morality and Crime*, The Free Press, New York, 1974., hlm. 145-146.

mungkin terjadi.¹⁷⁹ Pelaku delik politik dianggap menjadi penggerak atau pencetus delik terjadi.

Masyarakat atau warga negara memiliki peranan yang cukup signifikan dalam terjadinya kejahatan politik. Pentingnya posisi masyarakat semata-mata dikarenakan keberhasilan dari perbuatan ini ditujukan untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Kaitan antara kejahatan politik dan keterlibatan masyarakat, Schafer menyampaikan:

*The convictional law violator's altruism is seen as communal not only because it may come into conflict with power structure, but also because his violation of the law intends to make moral and societal ideals legitimate through crime, and his deviance is for purpose of achieving progress in society.*¹⁸⁰

Kejahatan politik lazimnya dilaksanakan dengan tujuan menggerakkan masyarakat dalam jumlah yang besar guna menghidupkan suatu gerakan untuk menggulingkan penguasa negara melalui penyebaran keyakinan yang menganut nilai dan moral yang berbeda dengan yang disakralkan oleh negara. Hanya saja tidak tertutup kemungkinan kejahatan ini dilaksanakan dalam komunitas kecil ataupun secara individu, namun tentunya efek yang dihasilkan tidak sebesar dengan sebuah kejahatan yang dibangun melalui gerakan yang besar.

Berkaitan dengan perbedaan antara pelaku kejahatan biasa dan politik, Remmelink menyebutkan sebagai berikut:

pelaku kejahatan biasa seorang penipu atau pencuri, tidak akan mempertanyakan daya berlaku sistem hukum yang ada sekalipun hanya sekedar untuk mempertahankan penguasaan atau kebendaan

¹⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 146. (... After all he has passion for the impossible that he believes is possible)

¹⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 148.

yang diperolehnya (secara melawan hukum), sebaliknya seorang pelaku kejahatan berdasarkan keyakinan justru mempertanyakan secara mendasar kekuatan keberlakuan hukum. Perbedaan kedua adalah bahwa pelaku kejahatan biasa umumnya termotivasi oleh kepentingan diri sendiri, sedangkan pelaku kejahatan berdasarkan keyakinan galibnya melakukan kejahatan untuk tujuan-tujuan di luar kepentingan diri sendiri. kebanyakan dari mereka bahkan berdasarkan keyakinan hati nurani sengaja menentang perundang-undangan yang berlaku. Meski demikian, ada pula yang bertindak semata-mata demi pertimbangan taktis. Beranjak dari sini, pelaku kejahatan atas dasar keyakinan acap kali berkehendak untuk menyebarkan gagasannya tentang negara ideal. Ia ingin merombak masyarakat, atau setidaknya mengganti pimpinan masyarakat karena ternyata kepemimpinan mereka harus dianggap gagal.¹⁸¹

Menurut Hazewinkel-Soeringa sebagaimana dikutip Loebby Loqman menyikapi kejahatan politik dari perspektif objektif dan subjektifnya, kejahatan politik adalah bersifat objektif, secara subjektif kejahatan politik dapat ditentukan dari motif politiknya.¹⁸² Hal inilah yang menurut peneliti dapat menjadi acuan menarik delik-delik biasa menjadi delik politik ketika unsur subjektifnya didominasi motif politik. Pada prinsipnya semua delik bisa yang dilandasi oleh keyakinan politik (misalnya melempari jendela rumah lawan politik) dapat digolongkan sebagai delik politik. Dalam pandangan ini, motivasi ideologi-politik merupakan satu-satunya kriteria yang harus digunakan untuk memilah delik politik dari delik umum.¹⁸³

Menurut Remmelink, hukum pidana menyoal delik politik pada dua *front*, yaitu:¹⁸⁴

Pertama, dalam konteks bantuan hukum internasional. Di sini kita berbicara mengenai penyerahan atau ekstradisi yang akan dibahas di bagian lain. Ekstradisi sebenarnya adalah suatu pranata hukum

¹⁸¹ Jan Remmelink, *op.cit.*, hlm. 73-74.

¹⁸² Lobby Loqman, *op.cit.*, hlm. 48.

¹⁸³ Jan Remmelink, *op.cit.*, 74-75.

¹⁸⁴ Jan Remmelink, *op.cit.* hlm. 75.

yang lebih tepat dimasukkan ke dalam hukum internasional dan bukan dalam hukum pidana. Namun dalam implementasi, ekstradisi, hukum pidana kerap ditunjuk dan dipergunakan, sedemikian sehingga sekarang ini ia juga dicakupkan ke dalam bidang hukum pidana. Ketika kita berhadapan dengan persoalan penyerahan/ ekstradisi pelaku-pelaku kejahatan politik, kita akan berhadapan dengan permasalahan yang diuraikan di atas, yakni pengertian 'delik politik' sendiri dilakukan untuk membatasi pengertian delik politik, setidaknya berkenaan dengan implementasi hukum ekstradisi...

Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa delik-delik politik sangat mempengaruhi (perkembangan) hukum pidana materil maupun formil. Dalam hal ini harus diingat adanya kemungkinan bahwa tindak-tindak pidana tertentu yang digolongkan sebagai delik politik akan diperiksa dengan cara yang khusus. Atau bahkan dibentuk peradilan khusus untuk memeriksa dan mengadilinya. Situasi demikian dapat kita lihat muncul di Belgia. Hanya *Hof van Assisen* yang boleh memeriksa dan mengadili delik-delik pers dan politik. Lembaga pengadilan biasa (*corretionele rechtbank*) tidak boleh memeriksa dan mengadili delik-delik pers dan politik. Lembaga pengadilan biasa (*corretionele rechtbank*) tidak berwenang memeriksa kasus-kasus tersebut.

Urgensitas unsur subjektif berupa motif politik dalam delik politik juga berperan dalam bekerjanya komponen/ sub sistem peradilan pidana, dimana motif politik dalam penegakan (hukum pidana) atau peradilan pidana akan sangat berperan untuk (1) menentukan apakah suatu tindakan tertentu dapat dikenakan pidana atau tidak; (2) menetapkan apakah pelaku pantas dikenakan pidana atau tidak; (3) menetapkan jenis pidana dan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan (4) pelaksanaan atau eksekusi dari pidana yang dijatuhkan.¹⁸⁵

Pada masalah di butir (1) merupakan titik sentral dalam kerangka urut penegakan hukum pidana terhadap pelaku delik politik. Penentuan perbuatan tersebut dapat dikatakan delik (politik) atau tidak menentukan

¹⁸⁵ Jan Remmelink, *op.cit.*, hlm. 76.

penerusan prosedur proses pemidanaan terhadap pelaku. Keadaan ini menjadi unsur penting berkaitan dengan sifat melawan hukum (*wedirectelijkheid*) yang harus melekat pada suatu perbuatan yang dapat dipidana, khususnya sifat melawan hukum materil (*materiele wedirectelijkheid*).

Sebelum diuraikan yang dimaksud dengan sifat melawan hukum materil (*materiele wedirectelijkheid*), maka terlebih dahulu peneliti menyebutkan arti melawan hukum/ *wederrechtelijkheid* adalah tanpa kewenangan yang melekat padanya ataupun tanpa dia berhak melakukan demikian¹⁸⁶, dan bertentangan dengan hukum.¹⁸⁷ Adapun sifat melawan hukum materil dalam penelitian ini bertitik berat pada pengertian/ makna materiel pada dari sudut perbuatan. Dalam hal ini sifat melawan hukum materil diartikan perbuatannya melanggar/ membahayakan “kepentingan hukum” yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.¹⁸⁸

Selain melihat sifat melawan hukum materil berdasarkan perbuatan, delik politik dalam hemat peneliti dapat juga dikaitkan dengan sifat melawan hukum dalam maknanya sebagai sumber hukum. Sifat melawan hukum materil sebagai sumber hukum tidak hanya sekedar melihat delik

¹⁸⁶ Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 15 Desember 1983, No. 275K/ Pid./ 1983, hal. 33 dalam Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 57.

¹⁸⁷ Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum Daripada Perbuatan Pidana*, Jajasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta, 1962, hlm. 28.

¹⁸⁸ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 26-27.

sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis), melainkan juga pada sumber lainnya. Kaitan sifat melawan hukum ini dapat dilihat dari dua fungsi sifat melawan hukum materiel sebagai sumber hukum, yaitu:

SMH Materiel biasanya dibedakan dalam fungsinya yang negatif dan positif. Dalam fungsinya yang **negatif**. Menurut ajaran SMH Materiel (hal-hal/ kriteria/ norma di luar undang-undang) dapat digunakan sebagai alasan untuk meniadakan/ menghapuskan (menegatifkan) sifat melawan hukumnya perbuatan. Jadi, tidak adanya SMH Materiel dapat digunakan sebagai alasan pembenar. SMH materiel dapat digunakan sebagai alasan pembenar. Menurut ajaran SMH materiel yang positif, sumber hukum materiel (hal-hal/ kriteria/ norma di luar undang-undang) dapat digunakan untuk menyatakan (mempositifkan) bahwa suatu perbuatan tetap dipandang sebagai tindak pidana (perbuatan melawan hukum) walaupun menurut undang-undang tidak merupakan tindak pidana.¹⁸⁹

Masih sehubungan dengan penegakan hukum pidana, salah satu karakteristik delik politik menurut Dionysious Spineliss ialah munculnya fenomena kembar berupa “penalisasi politik” (*penalization of politics*) dan “politikasi proses peradilan pidana” (*the politicizing of criminal proceedings*).¹⁹⁰ Karakter ini merupakan salah satu titik lemah dalam penegak hukum (pidana) pada delik politik yang memperlihatkan kerawanan berlangsungnya proses peradilan yang adil dan netral terhadap pelaku delik politik.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti akan menguraikan suatu hal yang lebih spesifik berkaitan dengan kejahatan politik pada penelitian ini, yaitu berkaitan dengan kejahatan terhadap Pancasila

¹⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 28.

¹⁹⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, *op.cit.*, hlm. 179.

sebagai ideologi negara dan dimensi atau ruang virtual terhadap kejahatan terhadap Pancasila melalui teknologi internet. Kejahatan terhadap Pancasila, dianggap sebagai kejahatan terhadap ideologi negara. Kejahatan terhadap ideologi dapat diartikan sebagai suatu kejahatan yang ditujukan untuk mereduksi nilai atau ide dalam suatu ideologi, meniadakan suatu ideologi resmi suatu negara yang dapat berakibat perubahan kondisi sosial kemasyarakatan negara tersebut. Kejahatan yang menyerang ideologi hampir dipastikan dilakukan dengan penyerangan melalui ideologi lainnya yang diyakini muatan nilai dan idenya jauh lebih baik dibandingkan yang dianut secara resmi.

Secara garis besar peneliti membagi tiga bentuk kejahatan terhadap Pancasila, yaitu (1) penyebaran ajaran yang dilarang dan dianggap bertentangan dengan Pancasila; (2) usaha penegasian Pancasila; dan (3) pereduksian nilai atau ide Pancasila melalui ideologi yang tidak dilarang. Perbuatan pada poin (1) dan (2) secara jelas telah teradopsi menjadi delik dalam hukum pidana nasional yang termuat dalam penambahan KUHP pada Pasal 107a, 107b, 107c, 107d dan 107e. Pada poin (3) hal ini lebih menekankan pada perbuatan moral dimana muatan nilai dan ide dalam Pancasila reduksi melalui pengadopsian ideologi lain yang menjadi lebih dominan dibandingkan Pancasila, seperti penguatan ekonomi dan politik anutan liberalisme yang dilegalkan melalui undang-undang yang secara nyata jelas diketahui bertentangan dengan Pancasila. Mengenai poin (3) ini akan dilakukan penelitian lebih lanjut,

dikarenakan ketika hendak menjadikan hal tersebut menjadi tindak pidana bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu, porsi pembahasannya akan dibahas pada Bab III.

Berkaitan jenis kejahatan terhadap Pancasila yang berada pada (1) dan (2) secara sering diidentikkan dengan gerakan-gerakan ekstrimis atau fundamentalis kanan dan kiri. Bentuk-bentuk tindak pidana yang merupakan delik politik ini dimasukkan pada bentuk kejahatan terhadap keamanan negara. Dalam hal ini akan diuraikan secara singkat mengenai pandangan-pandangan fundamental kanan dan kiri secara terpisah.

1. Fundamental/ ekstrim Kanan¹⁹¹

Berbicara mengenai gerakan fundamental kanan sebenarnya sangat sensitif dikarenakan bersentuhan dengan ajaran suatu agama. Namun dalam hal ini tidak dapat dibantahkan bahwa gerakan-gerakan yang berdasarkan anutan ideologi konservatisme ini mempunyai catatan sejarah dalam menyoal Pancasila sebagai ideologi negara dan bahkan gerakan-gerakan ini fanatisme sempit ini masih dapat dirasakan kehidupannya di Indonesia.

Sikap fundamentalis atau ekstrim tidak hanya melulu mengacu pada ajaran satu agama tertentu saja, sebagai contoh di di Negara-negara Eropa Barat, gerakan-gerakan ekstrim sering mengatas namakan agama Kristen, sedangkan di negara-negara Arab diacukan

¹⁹¹ Dalam membahas hal ini peneliti mencoba menguraikan secara hati-hati, dikarenakan belum banyaknya literatur yang telah peneliti selesai baca. Selain itu isu ya berkaitan dengan ekstrim/fundamental kanan merupakan isu yang sangat sensitif.

pada konsep pandangan terhadap agama Islam. Lazimnya gerakan ini dilakukan oleh pemeluk agama mayoritas untuk menentang sekularisme atau menimbulkan rasa permusuhan terhadap umat beragama lain. Fanatisme sempit merupakan ciri dari para fundamentalis kanan. Dalam hal ini, dapat disebutkan pola ekstrem kanan adalah:

- a. Sasaran pengaruh diarahkan terhadap golongan penganut ekstrem tertentu melalui pemuka-pemuka agama.
- b. Menanamkan fanatisme agama sebagai media memupuk militansi.
- c. Dalam membina pendapat umum, mempertentangkan kenyataan yang ada dengan dalil-dalil agama.
- d. Pembentukan kader melalui lembaga-lembaga pendidikan agama dan latihan tertentu.¹⁹²

Dalam sejarah Indonesia, sepengetahuan peneliti bahwa gerakan fundamental kanan telah dimulai sejak proses pembentukan Pancasila, dimana golongan ini merupakan golongan yang kekeh mempertahankan butir pertama Piagam Jakarta sebagai sila pertama. Berdasarkan perbedaan pandangan antara pembentukan Negara Islam atau Negara Nasionalis yang Berketuhanan. Berdasarkan benturan tersebut, lahirlah persiapan pembentukan Negara Islam Indonesia (NII)¹⁹³ pada 10 Februari 1948 melalui sebuah konferensi di Cisayong yang menghasilkan keputusan membentuk Majelis Islam dan mengangkat Kartosoewirjo sebagai Panglima Tinggi Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Keberadaan militer

¹⁹² H.A.M Effendy, *Falsafah Negara Pancasila*, Duta Grafika, Semarang, 1989, hlm 61 dalam Muh. Zumar Aminnudin, *Kebijakan Legislatif Dalam Rangka Perlindungan Ideologi dan Konstitusi Negara dengan Hukum Pidana* (Tesis), Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.

¹⁹³ Berdasarkan sejarah, pendirian NII telah mulai disosialisasikan semenjak 14 Agustus 1945.

dalam organisasi ini memperlihatkan perjuangan para fundamentalis tidak hanya berjuang dengan ideologi dan keyakinan melainkan juga dengan senjata.

Konferensi di Cisayong tersebut juga menyepakati bahwa perjuangan haruslah melalui langkah-langkah berikut:¹⁹⁴ Mendidik rakyat agar cocok menjadi warga negara Islam.

1. Memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa Islam tidak bisa dimenangkan dengan feblisit (referendum).
2. Membangun daerah basis.
3. Memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia.
4. Membangun Negara Islam Indonesia sehingga kokoh ke luar dan ke dalam, dalam arti, di dalam negeri dapat melaksanakan syari'at Islam seluas-luasnya dan sesempurna-sempurnanya, sedangkan ke luar, sanggup berdiri sejajar dengan warga negara lain.
5. Membantu perjuangan umat Islam di negeri-negeri lain sehingga dengan cepat dapat melaksanakan kewajiban sucinya.
6. Bersama negara-negara Islam membentuk Dewan Imamah Dunia untuk mengangkat khalifah dunia.

Selanjutnya, NII diproklamasikan 7 Agustus 1949, hanya saja tidak bertahan lama setelah Kartosoewirjo ditangkap dan dijatuhkan pidana mati. Walaupun demikian kematian Kartosoewirjo tidak mematikan gerakan kanan di Indonesia, gerakan ini tetap hidup dan bahkan perjuangannya mulai memasuki taraf modern dengan perjuangan parlementariat dan pemanfaatan media elektronik.

¹⁹⁴ Subagyo, *NII Gerakan Fundamentalisme Kanan dan Tahi Kebo "Keramat"*, <http://politik.kompasiana.com/2011/04/28/nii-gerakan-fundamentalisme-dan-tahi-kebo-keramat/>, diakses tanggal 14 Desember 2010.

2. Fundamental/ ekstrim Kiri

Penyebutan kiri diidentikkan dengan “simbol perlawanan”.¹⁹⁵ Lahirnya gerakan-gerakan kiri sebenarnya tidak mutlak bercita-cita melahirkan negara komunis, dikarenakan berbagai sosialisme, bahkan yang bercorak Indonesia pun terkadang menggunakan simbol-simbol kiri. Hanya saja golongan ini disebutkan sebagai kiri-tengah, dimana rasa nasionalisme terhadap tanah air masih sangat tinggi.

Sebagaimana telah dijelaskan pada sub sebelumnya, maka gambaran ideologi Komunisme di Indonesia kurang lebih memiliki corak yang sama dengan yang dimaksudkan dengan Lenninisme-Marxisme. Komunisme telah masuk ke Indonesia jauh sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Di Indonesia Komunisme masuk melalui seorang aktivis politik berhaluan Marxis, berkebangsaan Belanda bernama H.J.F.M. Sneevliet. Bersama teman-temannya ia mendirikan *Indische Sociaal Democratische Vereniging* (ISDV) pada tahun 1914, yang anggota-anggotanya juga masuk ke dalam Serikat Islam (SI). Pada Kongres ke VII bulan Mei 1920 berubah nama menjadi Perserikatan Komunis di Hindia Belanda. Dan pada tahun 1924 berubah menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI).¹⁹⁶

¹⁹⁵ Pengancungan tangan kiri merupakan simbol gerakan perlawanan terhadap penindasan dan kelaliman penguasa serta kaum kapitalis sebagai penghisap massa proletariat.

¹⁹⁶ Setneg, Gerakan 30 September, Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya, Jakarta, 1994, hal. 7-13

Berdasarkan sejarah Indonesia, pernah terdapat suatu Partai Komunis Indonesia (PKI) yang memiliki jumlah kursi parlemen yang cukup signifikan. Partai ini juga tercatat berafiliasi dengan komunis internasional. Hanya saja masih ada kesimpang siuran pendapat yang memposisikan partai ini pada block merah Peking atau Soviet, walaupun terdapat kecendrungan yang memposisikannya lebih dekat ke Soviet. Dalam perjalanan sejarah, PKI pernah tercatat melakukan gerakan 1 Oktober 1965¹⁹⁷ atau dapat disebutkan sebagai sebuah revolusi bersenjata untuk menegasikan Pancasila, namun lagi-lagi masih terdapat kesimpangsiuran sejarah mengenai peran tunggal PKI dalam gerakan ini. Suatu hal, yang membedakan PKI dengan komunisme lainnya ialah dimana agitasi tidak dilakukan dengan pertentangan agama secara radikal, namun lebih berfokus pada reformasi agraria yang dikuasai oleh tuan tanah yang mayoritasnya pemuka agama.

Sebagai catatan, PKI dan NII atau gerakan fundamental lainnya memiliki bentuk perjuangan yang bertentangan dengan yang tertuang dalam sila-sila Pancasila, namun dalam sejarah pembentukan Negara Indonesia, golongan fundamentalis ini memiliki peran yang cukup signifikan dalam perjuangan kemerdekaan. Selain itu, patut juga dicatat, gerakan fundamental yang ditumpas oleh negara ini juga meninggalkan catatan hitam, dimana terjadi pembantaian terhadap para penganut yang

¹⁹⁷ Peneliti lebih sepakata penggunaan Gerakan 1 Oktober dibandingkan Gerakan 30 September.

secara langsung menyadarinya ataupun terhadap mereka yang tidak menganut, namun terlibat dalam organisasi fundamentalis, khususnya berkaitan dengan anggota dan simpatisan PKI.

Selain ideologi yang bersifat transnasional yang dianggap dapat melahirkan ancaman yang riil terhadap Pancasila. Di samping ekstrem kiri dan kanan tersebut juga ada ekstrem lain yang bersumber pada absolutisme intelektual, sentimen kedaerahan yang berkembang menjadi separatisme dan heroisme yang salah dan dapat menjadi anarkhisme.¹⁹⁸

Salah satu contoh dari anutan yang melahirkan gerakan berbahaya dengan sentimen kedaerahan ini seperti, gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka, Republik Maluku Selatan dan lainnya. Dalam hal ini Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menegaskan, gerakan politik seperti Republik Maluku Selatan (RMS), Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan lain-lain, sama berbahayanya dengan organisasi apapun yang berbasis Ideologi Transnasional (antar-negara).¹⁹⁹

Seiring perkembangan zaman, berbagai ancaman ideologi terhadap Pancasila mungkin tidak jauh berbeda. Perubahan yang signifikan terjadi dengan cara pelaksanaan yang memanfaatkan keunggulan teknologi seperti perkembangan modus operandi kejahatan lainnya. Hanya saja, khusus dalam delik politik memiliki karakteristik yang berbeda dengan

¹⁹⁸ Ninik Suparni, *Tindak Pidana Subversi, Suatu Tinjauan Yuridis*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 26

¹⁹⁹ PBNU: RMS-OPM Sama Berbahayanya dengan Ideologi Transnasional, http://www.nu.or.id/page/id/dinamic_detil/1/9136/Warta/PBNU_RMS_OPM_Sama_Berbahaya_nya_dengan_Ideologi_Transnasional.html, diakses tanggal 14 Desember 2011.

kejahatan mayantara, dimana delik politik cenderung anti terhadap model-model penegakan hukum yang bersifat transnasional. Hal ini dikarenakan adanya hak dan kewajiban memberikan suaka politik. Disinilah benturan persoalan yurisdiksi delik politik yang dilakukan melalui internet menjadi suatu persoalan yuridis yang harus dihadapi. Oleh karena itu, kompleksitas kebijakan hukum pidana dalam menangani persoalan ini harus dilakukan secara cermat untuk melepaskan diri dari kompleksitas perpaduan dua model kejahatan ini.

Selanjutnya, berkaitan dengan kejahatan politik yang dilakukan melalui internet sama halnya dengan tindak pidana biasa yang dapat dikategorikan sebagai bagian dari kejahatan politik. Motif atau unsur subjektivitas pada kejahatan ini menjadi faktor utama untuk menentukan apakah tidak pidana mayantara yang terjadi dapat digolongkan sebagai *cyber political crime*. Ketika perbuatan yang dominan adalah motif politik dan motif altruistisnya terlihat nyata, maka penegakan hukum kejahatan ini mutlak tunduk pada ketentuan khusus yang melekat pada kejahatan politik, seperti tidak dapat diterapkannya ekstradisi.

Berkaitan dengan jenis-jenis kejahatan siber yang telah diuraikan pada sub B, paling tidak terdapat tiga jenis *cyber crime* yang dapat dikategorikan sebagai *cyber political crime*. Pertama, *political hackers*, populer dengan sebutan *hacktivist* melakukan perusakan terhadap ratusan situs *web* untuk mengkampanyekan programnya, bahkan tidak jarang dipergunakan untuk menempelkan pesan untuk mendeskreditkan

lawannya.²⁰⁰ *Hacktivism* terdiri dari dua kata, yaitu *hacking* dan *activism* karena dalam kegiatan *hacktivism* terdapat dua kegiatan yaitu *hacking* dan *activism*. Pada *hacktivism*, pelaku mula-mula melakukan *hacking* (pembobolan sistem komputer) dan setelah berhasil melakukan *hacking* baru kemudian pelaku melakukan *activism*.²⁰¹ Dari sudut perbuatan *hacking* dalam arti luas yang dapat disamakan dengan *cracking* ini hanya sebagai perbuatan permulaan dan selanjutnya diikuti perbuatan pokoknya untuk menyebarkan atau mengkampanyekan program ideologis. Dari unsur pelaku, mereka yang melakukan tindak pidana ini adalah para aktivis politik.

Pada dasarnya, *cyberterrorism* memiliki persamaan dengan *hacktivism*, dimana perbuatan dilakukan terlebih dahulu dengan melakukan pembobolan situs (*hacking*), tetapi keduanya berbeda dalam tujuan dan akibatnya.²⁰² Perbedaan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Cyberterrorism bertujuan antara lain menimbulkan ketakutan (*fear*), tetapi tidak demikian halnya dengan *hacktivism*. *Hacktivism* tidak menimbulkan ketakutan tetapi hanya bermaksud mencemooh korban. Apabila *cyberterrorism* dapat mengakibatkan kerugian yang dahsyat terhadap masyarakat — misalnya apabila *cyberterrorist* berhasil merusak sistem informasi suatu bank sentral, merusak jaringan listrik, merusak jaringan badan pengawas Pasar modal — tidak demikian halnya dengan *hacktivism*. *Hacktivism* paling jauh hanya mengubah tampilan situs (*defacement*) dari sasaran perbuatan tersebut. *Hacktivism* tidak menimbulkan kerusakan terhadap infrastruktur dan properti masyarakat.²⁰³

²⁰⁰ Abdul Wahid & Mohammad Labib, *op.cit.*, hlm. 71.

²⁰¹ Sutan Remy Syahdeny, *op.cit.*, hlm. 122.

²⁰² *Loc.cit.*

²⁰³ *Loc.cit.*

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat jelas perbedaan antara *cyberterrorism* dan *hacktivism*. Hanya saja perlu dilengkapi bahwa pembobolan situs pada *hacktivism* yang selalu diikuti dengan pengubahan tampilan situs dan penambahan informasi pasti selalu diikuti unsur kampanye atau agitasi.

Kedua, *hate sites*. Situs ini sering digunakan untuk saling menyerang dan melontarkan kata-kata tidak sopan dan vulgar yang dikelola oleh para ekstrimis. Penyerangan terhadap lawan sering menggunakan isu rasial, perang program dan promosi kebijakan atau suatu pandangan.²⁰⁴ Operasionalisasi kejahatan ini diarahkan dengan mengkampanyekan ajaran-ajaran yang mengagitasi masyarakat agar terpecah antar kelas dan kelompok. Khusus pada serangan terhadap Pancasila tentu muatan atau *content* pada domein atau *sites* tersebut diarahkan pada ketidakpercayaan atau penyudutan Pancasila sebagai ideologi yang tidak dapat diandalkan menghadapi persolan bangsa. Oleh karena itu, seruan perlawanan dan penolakan pada Pancasila diserukan melalui domein tersebut yang dilangsungkan secara konsisten. Selanjutnya, patut diketahui kejahatan ini tidak sekedar membangun kebencian di ruang virtual, namun dapat mengarahkan perlawanan dan permusuhan hingga ke dunia riil. Ancamannya dapat menyebabkan terjadinya gejolak yang dapat mengganggu stabilitas negara. Hanya saja, tidaklah keseluruhan *hate sites* dapat dikategorikan sebagai jenis *cyber political crime*,

²⁰⁴ Abdul Wahid & Mohammad Labib, *op.cit.*, hlm. 72.

dikarenakan bisa saja kebencian yang dikandung situs bersangkutan tidak bermotif politik sama sekali. Oleh karena itu, perlu kehati-hatian untuk menentukan suatu situs *hate sites* terkategori *cyber political crime* atau tidak.

Ketiga, *illegal content*. Kejahatan ini dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu yang tidak benar, tidak etis dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Contoh yang termasuk kejahatan jenis ini adalah pornografi, pemuatan berita bohong, agitasi termasuk juga delik politik dapat dimasukkan kategori ini bila menggunakan media ruang siber.²⁰⁵ Jenis *cyber crime* satu ini tidak selalu berfokus pada *cyber political crime* semata. Bentuk kejahatan ini memiliki kesamaan dengan *hate sites*, hanya saja situs atau domein yang memuat *illegal content* lazimnya tidak diadakan dengan sengaja serta inti dari perbuatan ialah memuat atau menampilkan *content* yang dilarang. Selanjutnya, intensitas serangan informasinya tidak secara teratur dan berkesinambungan seperti *hate sites* dikarenakan bisa saja sebenarnya domein ini diadakan untuk kebutuhan tertentu, hanya saja pada postingan tertentu memuat konten yang jelas-jelas dilarang oleh hukum.

²⁰⁵ *Loc.cit.*

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, A.Z. & Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yasrif Watampone, Jakarta, 2010.
- Anderson, Ben, 2010, *Tentang Pembunuhan Massal -65 dalam Cynthia Wirantaprawira (Penghimpun), Mengungkap Tabir Peristiwa 1 Oktober 1965 Mencari Keadilan, Lifting the Curtain on the Coup of October 1st 1965 Suing for The Justice*, Lembaga Persahabatan Jerman Indonesia Heidelberg Republik Federal Jerman, Freiburg.
- Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Bagus, Lorens, 2005, *Kamus Filsafat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Budiarjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2002, *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Deleuze, Gilles dan Felix Guattari, 2010, *What is Philosophy? Reinterpretasi Atas Filsafat, Sains dan Seni*, Jalasutra, Yogyakarta. (diterjemahkan oleh Muh. Indra Purnama).
- Effendy, H.A.M., 1989, *Falsafah Negara Pancasila*, Duta Grafika, Semarang.
- Emong Sapardjaja, Komariah, 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung.
- Hadisuprpto, Paulus, 2011, *Teori Kriminologi Latar Belakang Sosial, Intelektual, dan Parameternya*, Selaras, Malang.

- Hamzah, Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2008, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hoefnagels, G. Peter, 1973, *The Other Side of Criminology*, Kluwer (English translation by Jan G. M. Hulsman).
- Jonkers, J.E., 1987, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, PT.Bina Aksara, Jakarta.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah dan Pendapat2 Para Ahli Hukum Terkemuka Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa*.
- Lamintang, P.A.F., & Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Latif, Yudi, 2011, *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Kompas Gramedia, Jakarta.
- Loqman, Loebby, 1993, *Delik Politik di Indonesia*, Penerbit Ind-Hill-Co, Jakarta,.
- M Arief Mansur, 2009, Dikdik dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Refika Aditama, Bandung.
- M.L. Hc. Hulsman, 1984, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektf Perbandingan Hukum*. CV Rajawali, Jakarta (Penyadur dan Penerjemah Soedjono Dirdjosisworo).
- Magnis Suseno, 2001, Frans, *Pemikiran Karl Marx Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mahfud MD, Moh., 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2001, *Politik Hukum di Indonesia*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

- _____, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Marpaung, 1992, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2005, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Nawawi Arief, Barda, 1990, *Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- _____, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung,.
- _____, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra, Aditya Bakti, Bandung.
- _____, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- _____, 2007, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publising, Yogyakarta.

- _____, 2011, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Perspektif Pembaharuan & Perbandingan Hukum Pidana*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- _____, 2011, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (pidana) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- O.S. Hiariej, Eddy, 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta.
- Permana, IS. Heru, 2011, *Politik Kriminal*, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Rahardo, Satjipto, 2010, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- _____, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Raharjo, Agus, 2002, *Cybercrime, Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bahkti, Bandung.
- Rahman Nitibaskara, Tb. Ronny, 2001, *Ketika Kejahatan Berdaulat*, Peradaban, Jakarta.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, 2004, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Adytia Bakti, Bandung.
- Remmelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana Komentari atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Remy Syahdeini, Sutan, 2009, *Kejahatan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Rohman, Arif, 2009, *Politik Ideologi Pendidikan*, LeksBang Mediatama, Yogyakarta.

- Rosa, John, 2008, *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto*, Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra, Jakarta. (Penerjemah Hesri Setiawan).
- Sahetapy, J.E., 2009, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Setara Pers, Malang.
- Saleh, Roeslan, 1962, *Sifat Melawan Hukum Daripada Perbuatan Pidana*, Jajasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Schafer, Stephen, 1974, *The Political Criminal The Problem of Morality and Crime*, The Free Press, New York.
- Serikat Putra Jaya, Nyoman, 2005, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setneg, 1994, *Gerakan 30 September, Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya*, Jakarta, .
- Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sianturi, S.R. dan E.Y. Kanter, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Siswanto, Dadang, *Bahan Ajar Hukum Pidana Internasional*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- Soedjono, Imam, 2006, *Yang Berlawan: Membongkar Tabir Pemalsuan Sejarah PKI*, Resist Book, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.
- _____, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- _____, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- _____, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Suparni, Ninik, 1991, *Tindak Pidana Subversi, Suatu Tinjauan Yuridis*, Sinar Grafika, Jakarta.

Susanto, I.S., 2011, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Sutrisno, Slamet, 2006, *Filsafat dan Ideologi Pancasila*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Takwin, Bagus, 2009, *Akar-akar ideologi Pengantar "Kajian Konsep Ideologi dari Plato Hingga Bourdieu"*, Jalasutra, Yogyakarta.

Wahid, Abddurahman (editor), 2009, *Ilusi Negara Islam Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, Desantra Utama Media, Jakarta.

Wahid, Abdul dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung.

Widodo, 2009, *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime Alternatif Ancaman Pidana kerja sosial dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cyber Crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 18 (prp) Tahun 1960.

Undang-Undang Nomor 11/ PNPS/ Tahun 1963 Tanggal 16 Oktober 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Undang-Undang Nomor 26 Taun 199 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 11/ PNPS/ Tahun 1963 Tanggal 16 Oktober 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.

Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Ketetapan MPRS Nomor XXV/ MPRS/ 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 tentang Penghapusan Outsourcing atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada pekerjaan yang bersifat tetap sebagaimana yang diatur Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi.

Universal Declaration of Human Right, 10 Desember 1948.

International Covenant on Civil and Political Rights

The Constitution of The People's Republic of China

Criminal Law of The People's Republic of China

German Criminal Code

RSSF Criminal Code

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2008.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2010.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang informasi dan Transaksi elektronik

C. Makalah

Asshiddiqie, Jimly, *Ideologi, Pancasila dan Konstitusi*.

D. Website

Anonim, *Menteri Tifatul Blokir 300 Situs Radikal*, diakses dari <http://forum.kompas.com/nasional/42934-menteri-tifatul-blokir-300-situs-radikal.html>, dikases pada 29 Febuari 2011.

_____, *“Terobosan” Hakim Perkara Muchdi di Penghujung Tahun*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/ho120838/terobosan-hakim-perkara-muchdi-di-penghujung-tahun->, diakses 19 Febuari 2012.

_____, http://id.wikipedia.org/wiki/Nationalsozialistische_Deutsche_Arbeitspartei, diakses tanggal 18 Maret 2012.

Effendi, Djohan, *Harus Ada Kebebasan Untuk Tidak Beragama*, <http://islamlib.com/id/artikel/harus-ada-kebebasan-untuk-tidak-beragama>, diakses tanggal 11 April 2012.

Kemendiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>.

Macam-Macam Ideologi Negara, <http://www.adipedia.com/2011/04/macam-macam-bentuk-ideologi-negara.html>, diakses tanggal 11 November 2011.

PBNU: *RMS-OPM Sama Berbahanya dengan Ideologi Transnasional*, http://www.nu.or.id/page/id/dinamic_detil/1/9136/Warta/PBNU_RMS_OPM_Sama_Berbahayanya_dengan_Ideologi_Transnasional.html, diakses tanggal 14 Desember 2011.

Ritcher, Andrei, *Russia’s Modern Approach to Media Law*, is an extract from the publication IRIS *plus* 2011-1 “A Landmark for Mass

Media in Russia“, diakses dari http://www.obs.coe.int/oea_pub/iris/iris_plus/iplus1LA_2011.pdf .en , pada 20 Maret 2012.

- Rizal, M., *LaKIP: Pemerintah Harus Tinjau Kembali Pendidikan Agama Islam*, diakses dari <http://m.detik.com/read/2011/04/28/202127/1628130/159/lakip-pemerinta-harus-tinjau-kembali-pendidikan-agama-islam?nd992203605>, pada 29 Februari 2012.
- Sarwoko, Djoko, *Pembuktian Perkaa Pidana Setelah Beralkunya UU No. 11 Tahun 2008 (UU ITE)*, makalah, hlm. 10, diakses dari http://www.mahkamahagung.go.id/images/uploaded/15g.PEMBUKTIAN_PERKARA_PIDANA.pdf pada 17 Februari 2012
- Subagyo, *NII Gerakan Fundamentalisme Kanan dan Tahi Kebo “Keramat”*, <http://politik.kompasiana.com/2011/04/28/nii-gerakan-fundamentalisme-dan-tahi-kebo-keramat/>, diakses tanggal 14 Desember 2010.
- Sudarsa, Agun Gunanjar, *Pendidikan Pancasila sebagai Pembentuk karakter Bangsa*, <http://agun-gunandjarsudarsa.com/?p=135>, diakses tanggal 11 April 2011.
- Sumaatmadia, Dadi R., *Petikan Jawaban wawancara tertulis atas pertanyaan yang disampaikan oleh Redaktur Wawancara Majalah Tajuk*, 09 Februari 2000, diakses dari <http://www.facebook.com/note.php?noteid=381915004657>, pada 28 Februari 2012.
- Taylor, C. Holland, *Perjalanan Seorang Amerika ke Dunia Islam*, <http://www.commongroundnews.org/article.php?id=20835&lan=ba&sp=1>, diakses 01 Maret 2011.
- What is communism?, <http://www.wisegeek.com/what-is-communism.htm>, diakses tanggal 13 Desember 2011.
- What is tthe difference between socialism and communism, <http://www.wisegeek.com/what-is-the-difference-between-socialism-and-communism.htm>, diakses tanggal 13 Desember 2011.
- Wilson, *Pentingnya Hubungan Kemanusiaan di Balik Jeruji*, Sinar Harapan edisi 02 April 2005 lihat juga <http://pabelanmedia-online.page.tl/Resensi.htm>, diakses tanggal 27 Februari 2012.

www.wikipedia.org/ideologi, diakses tanggal 10 Juni 2011.